

**EVALUASI KEGIATAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ELOK BASAMO  
DI DESA PENYASAWAN KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

**OLEH:**

**WIRDATUL JANNAH  
187322045**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, atas nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan tesis ini. Shalawat dan salam pada junjungan alam, Rasulullah SAW yang menjadi inspirasi iman, islam dan semangat hidup saya.

Kupersembahkan karyaku ini untuk Ayahanda tercinta MUKHTAR dan Ibunda tercinta NURYANIS, yang telah mengasuh, melindungi dan mendidik ananda selama ini dengan kasih sayang dan ilmu agama yang tak ternilai harganya, semoga Allah SWT membalas seluruh daya dan upaya yang telah mereka lakukan. Selanjutnya untuk saudara-saudara saya, MUHAMMAD HASBI, HAYATUN NUFUS dan AKMAL MUHAMMAD, yang telah menemani hidup-hidup saya selama ini, mendukung dan menyemangati hingga sampai di titik ini.

Selanjutnya kupersembahkan tulisan ini teruntuk yang selalu menyemangati sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini, yaitu teman-teman prodi MIP akt 25 PPS UIR, gadi ocu, minions, ocu den, pikuinik, mak gardam squad, serta rekan dan teman-teman lain yang tidak disebutkan satu persatu, terimakasih atas masukan, kritikan, dan ketulusan dalam menemani saya selama ini.

## LEMBAR TUNJUK AJAR

Allah SWT berfirman:

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب (٨)

"Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?, dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu, dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)." (QS. Al-Insyirah 94)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Wirdatul Jannah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, tanggal Lahir : Ranah, 16 April 1996
4. Usia : 24 Tahun
5. Nama Orangtua : Mukhtar (Ayah)  
Nuryanis (Ibu)
6. Kewarganegaraan : Indonesia (WNI)
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Rt 002 Rw 001 Desa Ranah Kecamatan Kampar
10. Telepon/ HP : 0822- 8397- 6217
11. Email : [wirdatulj7@gmail.com](mailto:wirdatulj7@gmail.com)
12. Riwayat Pendidikan :  
2002-2008 SDN 004 Batu Ampar, Batam  
2008-2011 SMPN 1 Kampar  
2011-2014 SMAN 1 Kampar  
2014-2018 Universitas Riau Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP



**EVALUATION OF ACTIVITIES ELOK BASAMO VILLAGE OWNED  
BUSINESS AGENCIES (BUMDES) IN PENYASAWAN VILLAGE  
KAMPAR DISTRICTS KAMPAR KABUPATEN**

**WIRDATUL JANNAH**

**ABSTRACT**

Elok Basamo Village Owned Enterprises (BUMDES), located in Penyasawan Village. BUMDes Elok Basamo base on Peraturan Desa Penyasawan Nomor 003 Tahun 2016 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. BUMDes Elok Basamo carries out several activities, namely catfish ponds, daily soybeans, and credit goods. The purpose of the establishment of BUMDES Elok Basamo is to improve the Village economy, optimize Village assets to be useful for the welfare of the Village, increase community efforts in managing Village potential, develop business cooperation plans between villages and / or with third parties, create opportunities and market networks that support needs public services improve the welfare of the community through improving public services, equal distribution of the Village economy, and increasing the income of the Village community and Village Income. This study aims to determine the evaluation of BUMDES Elok Basamo activities, and the causes of not achieving the BUMDes objectives. This research uses qualitative methods and descriptive research type. Data collection is done by interview, observation and documentation. The results showed that the effectiveness (goal) of establishing BUMDES where employment was still minimal, the contribution of Bumdes activities was still small in the village and other goals had not been achieved, the efficiency of funds was still not maximized, seen from the loss of fish pond activities, the accuracy of the activities was achieved. The lack of community responsiveness in Elok Basamo's BUMDES activities, meanwhile the indicators of adequacy and equity are also not optimal, even though the three Elok Basamo BUMDES activities are carried out and with large capital. Based on the results of evaluation research on the three Bumdes Elok Basamo activities, they have been running, but they are still far from optimal, because there are several causes including BUMDes management, awareness of the management and lack of community participation residents, opening jobs.

Keywords: Evaluation, Activity, Bumdes

**EVALUASI KEGIATAN BADAN USAHA MILIK DESA ELOK BASAMO  
(BUMDES) DI DESA PENYASAWAN KECAMATAN KAMPAR  
KABUPATEN KAMPAR**

**WIRDATUL JANNAH**

**ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Elok Basamo yang berlokasi di Desa Penyasawan. BUMDes Elok Basamo didirikan berdasarkan Peraturan Desa Penyasawan Nomor 003 Tahun 2016 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar BUMDES Elok Basamo melakukan beberapa kegiatan yaitu tambak lele, kedelai harian, dan barang kredit. Tujuan didirikannya BUMDES Elok Basamo adalah untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan Desa, meningkatkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi Desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan / atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan pelayanan publik meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemerataan perekonomian Desa, serta peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kegiatan BUMDES Elok Basamo, dan penyebab tidak tercapainya tujuan BUMDes tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas (tujuan) pendirian BUMDES dimana penyerapan tenaga kerja masih minim, kontribusi kegiatan Bumdes masih kecil di desa dan tujuan lain belum tercapai, efisiensi dana masih belum maksimal, terlihat dari kerugian. kegiatan tambak ikan, ketepatan kegiatan tercapai Minimnya responsivitas masyarakat dalam kegiatan BUMDES Elok Basamo, sedangkan indikator kecukupan dan pemerataan juga belum optimal, padahal ketiga kegiatan BUMDES Elok Basamo tersebut dilaksanakan dan bermodal besar . Berdasarkan hasil penelitian evaluasi terhadap ketiga kegiatan Bumdes Elok Basamo tersebut sudah berjalan, namun masih jauh dari optimal, karena ada beberapa penyebab antara lain pengelolaan BUMDes, kesadaran pengelolaan dan kurangnya partisipasi masyarakat warga, pembukaan lapangan kerja. .

Kata Kunci: Evaluasi, Aktivitas, Bumdes

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Evaluasi Kebijakan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Elok Basamo Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**”. Tesis ini disusun atas dasar memenuhi salah satu syarat penulisan tesis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan. Adapun tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis berharap masukan dan saran demi perbaikan penyusunan karya tulis lainnya ke depannya.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Untuk itu, secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau dan Pembimbing 1.
3. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP. MA. Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana dan Pembimbing 2.
4. Seluruh Dosen Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Riau dalam hal ini tidak dapat disebutkan nama dan jabatannya satu persatu yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Seluruh staff tata usaha program studi pascasarjana yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan selama menjalani pendidikan baik berupa data maupun informasi yang dibutuhkan penulis.
6. Kedua orangtua yaitu Bapak Mukhtar dan Ibu Nuryanis, serta saudara-saudara penulis Muhammad Hasbi, S.St, Hayatun Nufus, S.Ab, dan Akmal Muhammad.
7. Rekan-rekan Prodi MIP akt 25, Minions, Achyar Hanif Siregar, Ratih Sanima, Hapis Akbar, Pikuinik, Gadi Ocu, Ocu Den, dan seluruh teman-teman yang terlibat langsung maupun tidak langsung.
8. Pengurus BUMDes Elok Basamo, Pemerintah Desa Penyawasan, dan masyarakat yang telah terlibat dalam penyusunan tesis ini.

Pekanbaru, 15 Desember 2020

Penulis,

WIRDATUL JANNAH



## DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	iii
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
KETERANGAN BEBAS PLAGIASI .....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
LEMBAR TUNJUK AJAR.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Rumusan Masalah .....	12
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	13
1.4.2 Kegunaan Penelitian.....	13
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>14</b>
2.1 Konsep Teori .....	14
2.1.1 Ilmu Pemerintahan .....	14
2.1.2 Pemerintah .....	16
2.1.3 Kebijakan Publik .....	19
2.1.4 Evaluasi .....	22
2.1.5 Desa.....	28
2.1.6 Badan Usaha Milik Desa .....	33
2.2 Ulasan Karya .....	36
2.3 Kerangka Pemikiran .....	39
2.4 Konsep Operasional .....	40
2.5 Operasional Variabel .....	42
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	43

3.2 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.4 Teknik Analisis Data .....	46
3.5 Objek Penelitian.....	47
3.6 Lokasi Penelitian.....	47
3.7 Informan Penelitian.....	48
3.8 Sistematika Penulisan .....	49
3.9 Jadwal Penelitian.....	51
<b>BAB IV</b>	
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	52
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	52
4.1.2 Desa Penyasawan.....	58
4.1.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Elok Basamo.....	60
4.2 Evaluasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Elok Basamo.....	61
4.2.1 Efektifitas.....	66
4.2.2 Efisiensi.....	75
4.2.3 Perataan.....	88
4.2.4 Responsivitas.....	91
4.2.5 Ketepatan.....	94
4.2.6 Kecukupan.....	95
4.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Elok Basamo.....	96
4.3.1 Faktor Pendukung.....	96
4.3.2 Faktor Penghambat.....	97
4.4 Problem Solving.....	99
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	103
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ulasan Karya.....	36
Tabel 2.2 Operasional Variabe .....	42
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian .....	48
Tabel 4.1 Periodesasi Pergantian Kepala Desa dan Sekretaris Desa Penyasawan ....	59
Tabel 4.2 Monografi Desa Penyasawan.....	60
Tabel 4.3 Pengucuran Dana Dari Pemerintah Desa ke BUM Desa Elok Basamo Tahun 2017-2019 .....	75
Tabel 4.4 Laporan Keuangan Keday Barang Harian BUM Desa Elok Basamo Oktober 2019- Oktober 2020 .....	79
Tabel 4.5 Daftar Nasabah Kredit Barang BUM Desa Elok Basamo Desember 2019- Januari 2020.....	82
Tabel 4.6 Daftar Nasabah Kredit Barang BUMDes Elok Basamo Maret-September 2020.....	86
Tabel 4.7 Daftar Nasabah Kredit yang Menunggak .....	77
Tabel 4.8 BUMDes Unggulan di Kabupaten Kampar.....	99

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Evaluasi Kegiatan BUMDes .....	39
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pengurus BUMDes Elok Basamo .....	62



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan pembangunan merupakan cara mewujudkan tujuan tersebut. Pembangunan membutuhkan kontribusi seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan meliputi berbagai sektor kehidupan seperti politik, hukum, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta yang paling utama yaitu sektor ekonomi. Sektor ekonomi merupakan sektor penentu dan paling berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi kesempatan dan menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan, dimana Desa sebagai subjek pembangunan bukan lagi objek pembangunan. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana oleh Pemerintah Pusat yang kemudian digunakan untuk mengelola potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat, guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa. Setiap tahun Pemerintah Pusat menganggarkan dan mengucurkan Dana Desa yang diperuntukan untuk Desa.

---

<sup>1</sup> Suryati. 2015. *Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan oleh Pemerintah Desa*. Ejournal Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa serta meminimalisir masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotoroyongan guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>3</sup>

Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa dan meningkatkan perekonomian Desa yang bercirikan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membuka kesempatan bagi Desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>3</sup> Pasal 78 Angka 1 Dan Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong dan menstimulus masyarakat Desa berkegiatan yang dapat menghasilkan pendapat bagi masyarakat, untuk selanjutnya berguna bagi Desa dan bisa memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes disebutkan bahwa pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Dimana kegiatan yang dilakukan BUMDes dapat ditentukan bersama oleh seluruh masyarakat Desa, namun diharapkan kegiatan atau program dari BUMDes tersebut dapat memaksimalkan potensi masyarakat Desa (sumber daya manusia) dan juga potensi ekonomi, sumber daya alam yang dimiliki Desa.

BUMDes dibentuk berdasarkan musyawarah Desa, untuk kemudian dibentuk pengurus pelaksana BUMDes yang berasal dari masyarakat Desa setempat. BUMDes dapat mendirikan dan menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMDes diharapkan



dapat menciptakan kemandirian masyarakat dan memperkuat ekonomi desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes.

Dengan hadirnya BUMDes, membuka kesempatan bagi Desa menjadi subjek pembangunan, yang menggerakkan sumber daya manusia Desa, memanfaatkan sumber daya alam dan aset-aset yang dimiliki Desa.

Kehadiran BUMDes bertujuan untuk membuka lowongan kerja untuk masyarakat Desa sehingga menyerap tenaga kerja, meningkatkan kreatifitas, membuka peluang usaha ekonomi lokal, dan mengangkat perekonomian masyarakat yang berpenghasilan rendah. Melayani masyarakat Desa dalam mengembangkan usaha produktif merupakan sasaran pemberdayaan pendirian BUMDes. BUMDes juga bertujuan menyediakan media dan penunjang serta membuka peluang kerjasama masyarakat dengan pihak lain sesuai dengan potensi Desa dan kebutuhan masyarakat.<sup>4</sup>

Desa memiliki kewenangan yang disebut kewenangan lokal berskala Desa. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian dari Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi).

Dimana menurut paradigma baru Pemerintah dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diberikan rakyat. Menurut Kamus Umum Bahasa

---

<sup>4</sup> Kusuma, Tedi. *Pembentukan Dan Pengelolaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus Di Desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2018. Hal., 20

Indonesia kewenangan berasal dari kata wewenang, dimana wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Dalam banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat.<sup>5</sup> BUMDes merupakan salah satu bentuk kewenangan lokal berskala Desa dan sebagai badan ekonomi yang beroperasi di pedesaan, serta memiliki perbedaan dengan badan ekonomi lainnya karena bercorak lokal.

BUMDes merupakan strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut *Tradisi Berdesa*), dan juga strategi kebijakan *membangun Indonesia dari pinggiran* melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.

BUMDes juga merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa, dimana bentuk kemandirian ekonomi Desa tersebut digerakan dengan unit-unit usaha yang strategis dan potensial bagi Desa.<sup>6</sup>

Desa berdaulat secara ekonomi, dimana Desa memiliki kemampuan dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berada di Desa terkait. Desa juga dapat mengelola sumber daya Desa secara berkelanjutan, guna kelestarian dan kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan jangka panjang.

---

<sup>5</sup> Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing. Hal., 52

<sup>6</sup> Buku 7: Badan Usaha Milik Desa: *Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hal., 9

Dalam menjaga aset ekonomi Desa, Pemerintah Desa dapat menyerahkan pengelolaan aset kepada BUMDes, dimana pengurus BUMDes merupakan masyarakat yang telah ditunjuk atau dipilih melalui musyawarah Desa dan telah diberikan wewenang untuk mengelola aset ekonomi Desa atau mengelola potensi Desa. Lingkungan kelembagaan ekonomi desa yang lebih inklusif malah tidak menjadi referensi model pengembangan ekonomi lokal.<sup>7</sup>

Ada beberapa strategi yang seringkali dipraktikkan dalam membangun kemandirian Desa dari dalam Desa. *Pertama*, meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil di Desa dan kapasitas masyarakat Desa menjadi lebih kritis dan dinamis. *Kedua*, meningkatkan kapasitas pemerintahan dan interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, dimana kemampuan teknokratia aparatur Desa yang mampu membuat perencanaan program atau kegiatan pembangunan dapat langsung memperlihatkan secara nyata progres pembangunan, selain itu kapasitas BPD dalam perumusan dan pengambilan kebijakan juga memang peran penting.

*Ketiga*, merencanakan sistem pembangunan dan penganggaran dana Desa yang efektif dan efisien Ketika sistem telah terencana maka untuk mewujudkan Desa mandiri dan berdaulat lebih terarah, selain itu anggaran yang efektif dan efisien tentu meningkatkan peluang pembangunan yang lebih maksimal. *Keempat*, membentuk lembaga ekonomi lokal yang produktif, dengan adanya lembaga ekonomi lokal yang

---

<sup>7</sup> Buku 5: *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hal., 16

produktif maka potensi Desa yang ada bisa dimanfaatkan dengan maksimal, selain itu lembaga ekonomi lokal juga bisa membangun perekonomian yang khas dan memperhatikan kearifan lokal.

Telah banyak badan ekonomi lokal seperti BUMDes di Indonesia yang sukses dan tumbuh atas inisiatif Desa dan masyarakat Desa. Kesuksesan BUMDes-BUMDes tersebut karena kemampuan, manajemen, konsistensi, partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan perencanaan dan penganggaran dana dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang baik dan maksimal. Dana Desa yang dikururkan dan diperuntukan untuk BUMDes dirasakan manfaatnya langsung oleh Desa.<sup>8</sup>

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan pada Desa-Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembangunan Desa merupakan prioritas penggunaan Dana Desa, dan untuk tujuan dari pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta menekan angka kemiskinan melalui: pemenuhan kebutuhan dasar; pembangunan sarana dan prasarana Desa; pengembangan potensi

---

<sup>8</sup> Loc. It., Hal., 27

ekonomi lokal; dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015, prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang meliputi:

- a) pembentukan dan pengembangan BUMDes;
- b) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f) pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g) pengembangan benih lokal;
- h) pengembangan ternak secara kolektif;
- i) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k) pengelolaan padang gembala;
- l) pengembangan Desa Wisata; dan
- m) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Bab III Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Sementara itu, Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan akses atas sumber daya ekonomi yang sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, juga mencakup mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya.

BUMDes Elok Basamo yang terletak di Desa Penyawasan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar telah berdiri sejak Desember 2016. BUMDes Elok Basamo didirikan atas landasan Peraturan Desa Penyawasan Nomor 003 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Penyawasan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Pendirian BUMDes Elok Basamo bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi Desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pemerataan ekonomi Desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Hasil Desa.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

<sup>11</sup> Pasal 6 Peraturan Desa Penyawasan Nomor 003 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Desa Penyawasan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

BUMDes Elok Basamo memiliki 3 (tiga) unit usaha atau kegiatan, yaitu:

- 1) Tambak ikan lele.
- 2) Kedai harian.
- 3) Kredit barang.

Pada tahun pertama terbentuknya BUM Desa Elok Basamo mendapatkan dana sebesar Rp 65.000.000,00 dari Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa, yang kemudian digunakan untuk membuat tambak ikan. Untuk kegiatan tambak ikan lele, pihak BUMDes mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Dimana BUMDes menyediakan modal dan keperluan pelet, kemudian masyarakat mengelola atau memelihara tambak. Kegiatan tambak dilakukan dengan sistem bagi hasil. Pada awalnya mendapatkan keuntungan Rp 9.000.000,00 per masa panen. Namun, tahun kedua berjalan terjadi kerugian karena harga jual ikan yang jatuh di pasaran.

Kemudian BUMDes Elok Basamo membuka kedai sembako dan menjual bahan bakar minyak pom mini. Pada akhir 2019, BUMDes Elok Basamo mulai menyalurkan dananya untuk kegiatan kredit barang, dimana modal dari kegiatan kredit barang ini bersumber dari Dana Bantuan Khusus yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi sebesar Rp 138.000.000,00. Sistem kredit barang ini, masyarakat memilih barang yang diinginkan, kemudian pihak BUMDes yang mengurus pembelian pada agen atau toko yang ditunjuk konsumen.

Sejak didirikan BUMDes Elok Basamo belum mencapai target kontribusi terhadap PADes. Pada APBDes tahun 2019 kontribusi BUMDes terhadap PADes sebesar Rp 1.000.000,00. Selain itu, berdasarkan penuturan salah satu pengurus pelaksana BUMDes Elok Basamo, beberapa anggota mulai jenuh mengurus BUMDes karena ketidakpastian besaran tunjangan yang semula tercantum dalam PerDes tentang BUMDes sebesar 50% (keseluruhan pengurus) dari realisasi laba keuntungan kegiatan BUMDes perbulan namun tidak sesuai karena keuntungan BUMDes yang tidak pernah memberikan sumbangsih yang besar terhadap APDes.

Partisipasi masyarakat terlihat dalam kegiatan tambak ikan lele. Di samping itu, masyarakat sekitar keday harian juga membeli kebutuhan pokok di sana karena harga yang terjangkau. Dengan pelbagai unit kegiatan/ usaha yang dimiliki BUMDes Elok Basamo dan kontribusi yang minim tersebut membuat peneliti tertarik meneliti kebijakan BUMDes Elok Basamo.

Berikut adalah fenomena yang penulis temukan di lapangan.

- 1) Salah satu tujuan dibentuknya BUMDes adalah sebagai upaya penyerapan atau peningkatan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat Desa dimana BUMDes itu didirikan, namun sepanjang beroperasi BUMDes Elok Basamo hanya menyerap sedikit tenaga kerja.
- 2) Tujuan lain didirikannya BUMDes adalah peningkatan PADes. Namun kontribusi BUMDes pada Desa terbilang sangat sedikit yaitu pada 2017 sebesar Rp 1.000.000,-, pada 2018 sebesar Rp 1.800.000,- dan pada tahun 2019 sebesar Rp



1.000.000,- hanya berkisar 1 jutaan pertahun selama beroperasi pada modal yang dikucurkan besar.

- 3) Melalui kegiatan kredit barang, BUMDes Elok Basamo telah menjalin kerjasama dengan 2 mitra, yaitu grosir ponsel dan grosir barang elektronik. Dimana kerjasama ini berdampak pada keduabelah pihak. Namun ada beberapa nasabah yang menunggak.
- 4) Kegiatan tambak ikan terdiri atas 2 lokasi, yang semula untung harus dihentikan pada 2019 karena rugi.

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini Dengan Judul **“EVALUASI KEGIATAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) ELOK BASAMO DI DESA PENYAWASAN KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan temuan dilapangan, BUMDes Elok Basamo menjalankan semua unit kegiatan atau usaha, namun dalam tambak ikan pihak BUMDes mengalami penurunan keuntungan. Untuk kedai harian, pengelola kesulitan mendapatkan penghasilan karena persaingan harga. Sehingga tujuan dibentuknya BUMDes Elok Basamo yang diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap PADes dan meningkatkan perekonomian Desa belum tercapai.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana evaluasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa Elok Basamo di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?
- 1.3.2 Apa saja faktor penghambat dan pendukung pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Elok Basamo di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?

### 1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1.4.1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui evaluasi kegiatan BUMDes Elok Basamo Di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kebijakan pembentukan BUMDes Elok Basamo Di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

## 1.4.2 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

### 1.4.2.1 Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan BUMDes Elok Basamo Desa Penyasawan ke depannya.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak mengenai BUMDes Elok Basamo Desa Penyasawan.

### 1.4.2.2 Kegunaan Akademis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan penelitian ini.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan teori-teori yang terkait dengan penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1 Konsep Teori

##### 2.1.1 Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan berasal dari kata ilmu dan pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Pelbagai pengertian tentang Ilmu Pemerintahan dikemukakan oleh para ahli. Kata kunci dari Ilmu Pemerintahan menurut pendapat Blakeslee adalah “ *securing of ends*” dan “ *securing the ends of their existence*”, yang berarti tekanan Ilmu Pemerintahan adalah menjamin sampai mencapai batas,

atau menjamin sampai batas dari sebuah eksistensinya. Kata menjamin berarti menjaga dan menjamin agar seseorang, sekelompok orang, ataupun organisasi dapat mencapai tujuan dan menjaga eksistensinya sesuai hukum yang disepakati.<sup>12</sup>

Ilmu Pemerintahan merupakan bagian dari rumpun ilmu-ilmu sosial dan menggunakan semua cara pandang, cara pikir, maupun pendekatan yang digunakan pada ilmu-ilmu sosial lainnya. Namun Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu mandiri yang mempunyai karakteristik khusus yang membedakan Ilmu Pemerintahan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.<sup>13</sup>

Dilihat dari objek materialnya, pembahasan tentang pemerintahan selalu dikaitkan dengan institusi Negara, serta memiliki hubungan yang sangat erat, saling mempengaruhi, serta saling meminjam konsep dan teori dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Dilihat dari objek formanya, Ilmu Pemerintahan mencakup aspek-aspek:

- a) Hubungan antara institusi pemerintah sebagai representasi Negara dengan masyarakatnya dalam keadaan yang berlainan sesuai dengan bentuk Negara, sistem politik, maupun sistem pemerintahan yang dianut.
- b) Yang dijalankan pemerintah adalah kewenangan, yakni kekuasaan sah yang telah dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan.

<sup>12</sup> Wasistiono, Sadu. 2017. *Perkembangan Ilmu Pemerintahan (Dari Klasik Sampai Ke Kontemporer)*. Sumedang: IPDN Press. Hal., 40

<sup>13</sup> Loc it., Hal., 23

- c) Tugas utama pemerintah adalah memberi pelayanan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan umum.<sup>14</sup>

Dalam Wasistiono, Soewargono berpandangan bahwa Ilmu Pemerintahan memiliki dua identitas yakni:

- a) Ilmu Pemerintahan tidak dapat sepenuhnya berpikir kasual seperti ilmu-ilmu sosial lainnya, tetapi berpikir secara teleologik atau final.
- b) Ilmu Pemerintahan pada hakekatnya adalah ilmu rangkuman, dengan memanfaatkan berbagai ilmu lainnya yang relevan, sehingga sifatnya eklektik.<sup>15</sup>

Ndraha (dalam Wasistiono) mengemukakan ada Sembilan ruang lingkup Ilmu Pemerintahan yaitu:

- a) Yang diperintah;
- b) Tuntutan yang diperintah (jasa publik dan layanan sipil);
- c) Pemerintah;
- d) Kewenangan, kewajiban, dan tanggungjawab pemerintah;
- e) Hubungan pemerintah;
- f) Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggungjawabnya;
- g) Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian;
- h) Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggungjawabnya;

---

<sup>14</sup> Loc it., Hal, 61

<sup>15</sup> Loc it., Hal, 49

- i) Bagaimana supaya kinerja pemerintah sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.<sup>16</sup>

### 2.1.2 Pemerintahan

Pada paradigma lama, Pemerintahan identik dengan Negara sehingga Pemerintahan berorientasi pada kekuasaan. Sedangkan pada paradigma baru, Pemerintahan berorientasi pada masyarakat sehingga dimaknai sebagai objek yang melakukan proses menata dan mengelola kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Paradigma baru memberi pedoman dan tekanan bahwa Pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam menjalankan Pemerintahan dan wewenang yang dimiliki Pemerintah merupakan amanah dari rakyat.

Secara etimologi menurut Inu Kencana Syafii, pemerintah adalah sebagai berikut: Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari unsur rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan. Jika ditambah awalan "Pe-" menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus. Jika ditambah akhiran "-an" menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Ndharma menyatakan bahwa Pemerintahan merupakan sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan pelayanan sipil.

Dalam kehidupan bernegara, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Loc it., Hal. 53

- a) Adanya partisipasi warga negara yang aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana warga negara dapat menyampaikan kritik, gagasan dan ide demi memperjuangkan kepentingan bangsa dan disalurkan dalam lembaga perwakilan atau cara-cara yang tidak melanggar peraturan perundangan.
- b) Adanya perlindungan terhadap hak-hak rakyat secara konstitusional. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara artinya hak-hak warga negara memperoleh jaminan perlindungan hukum yang kokoh dalam konstitusi negara (Undang-Undang Dasar). Dengan adanya jaminan yang tegas dari konstitusi diharapkan hak-hak warga negara dihormati, sehingga warga negara dapat melaksanakan hak-haknya dengan baik tanpa adanya keraguan karena dijamin oleh konstitusi negara.
- c) Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Peradilan yang bebas dan tidak memihak artinya badan peradilan dalam menjalankan fungsinya tidak dipengaruhi atau dicampurtangani oleh kekuasaan manapun termasuk kekuasaan eksekutif (presiden). Sehingga dalam mengambil suatu keputusan akan menggunakan pikiran jernih berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan masyarakat.
- d) Adanya Pemilihan Umum. Pemilihan umum yang demokratis adalah pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pemilihan umum merupakan mekanisme untuk menentukan komposisi dalam pemerintahan dan parlemen secara berkala dan merupakan sarana utama bagi masyarakat untuk ikut



berpartisipasi dalam bidang politik. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu yang berkelanjutan merupakan langkah penting untuk kelangsungan hidup.

- e) Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan untuk berorganisasi. Dalam negara demokratis pendapat dan berorganisasi merupakan ciri khas, yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam roda pemerintahan, untuk memperjuangkan kepentingan, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Negara.
- f) Adanya pengakuan dan supremasi hukum. Negara demokrasi menjunjung tinggi hukum, tunduk dan taat kepada hukum, hukum menjadi dasar penyelenggaraan roda pemerintahan. Sedangkan supremasi hukum juga menjadi poin penting dalam negara demokrasi, dimana setiap warga negara berkedudukan yang sama di hadapan hukum, semua lapisan masyarakat setara di hadapan hukum tanpa pandang bulu. Jika suatu negara sudah taat dan tunduk pada hukum maka penyelenggaran roda pemerintahan dan kehidupan berbangsanua akan demokratis dan mudah mencapai tujuan dari negara tersebut.<sup>17</sup>

Suatu Pemerintahan juga harus berpegang pada rule of law (aturan hukum) dimana suatu pemerintahan harus ada supremasi hukum (rakyat harus taat dan tunduk pada hukum yang menjadi landasan tertinggi bernegara), semua warga negara setara dan sama posisinya di hadapan hukum, dan ada perlindungan serta jaminan terhadap hak asasi manusia.

---

<sup>17</sup> Munaf, Yusri. 2015. Hal., 59

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diberi wewenang oleh rakyat untuk menata, mengelola dan menyelenggarakan urusan, tugas dan kewajiban sebagai alat Negara untuk mencapai tujuan bernegara. Sedangkan Pemerintah adalah pelaksana dari Pemerintahan.

### 2.1.3 Kebijakan Publik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana, garis pedoman dan garis besar pelaksanaan suatu kegiatan, pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak untuk manajemen dalam usaha mencapai tujuan. Ghani dan Lockhart (Wahab: 2007) menegaskan kebijakan publik ada di sekitar kita, bahkan jika kita tidak bisa melihatnya.<sup>18</sup>

Wujud dari kebijakan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang mengikat dan diakui hukum. Dimana peraturan tersebut mengatur dan mengikat subjek dan objek yang tertera dalamnya. Pembuatan kebijakan dianggap penting dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang sedang terjadi. Pembuatan kebijakan merupakan proses panjang yang harus memperhatikan pelbagai hal dan aspek kehidupan.

Studi kebijakan melingkupi pelbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, budaya, keamanan, hukum, dan lainnya. Menurut

<sup>18</sup> Abdul Wahab, Solichin. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal., 5

hirarkinya, kebijakan publik bersifat nasional, regional maupun lokal, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi kebijakan publik (public policy) dapat diartikan berdasarkan sudut pandang.<sup>19</sup>

Menurut Easton kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh lapisan masyarakat. Sedang, Laswell dan Kaplan mengartikan kebijakan publik sebagai suatu program yang berisi tujuan, nilai-nilai yang terarah demi mencapai tujuan tertentu.

Menurut James E. Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-25) ada beberapa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a) Kebijakan substantif dan kebijakan procedural.

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang berhubungan dengan suatu hal yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

- b) Kebijakan distributif, kebijakan regulatori dan kebijakan redistributif.

Kebijakan distributif adalah kebijakan yang berkenaan dengan penyaluran pelayanan, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat atau individu.

Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berwujud larangan atau batasan terhadap perilaku individu atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

---

<sup>19</sup> Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama Pers. Hal, 3

Sedangkan kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

- c) Kebijakan material dan kebijakan simbolik.

Kebijakan material merupakan kebijakan yang berorientasi pada keuntungan sumber daya tertentu pada kelompok sasaran.

Sementara itu, kebijakan simbolik merupakan kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok tertentu.

- d) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods).

Kebijakan adalah bagian ilmu sosial yang berorientasi pada masalah kontekstual, multi disiplin dan syarat akan nilai yang normatif dikembangkan oleh Harold Lasswell dkk pada PD II. Dimana kebijakan tidak terbatas oleh tujuan teoritis namun juga memiliki tujuan praktis sehingga memerlukan keputusan yang efisien.

Tujuan akhir dikembangkannya kebijakan secara umum adalah untuk mencapai demokrasi yang menjunjung tinggi martabat manusia baik secara teori dan fakta. Namun kenyataannya, kebijakan-kebijakan yang dirancang tidak sesuai untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan harkat hidup manusia dan malah berorientasi pada kekuasaan. Sehingga hanya dipandang sebagai alat dari penguasa.

Sedang William Dunn dalam Joko Santoso merumuskan bahwa kebijakan sebagai suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah-masalah sosial. Dalam

orientasinya Dunn lebih menekankan bagaimana hakekat permasalahannya, makna terhadap pemecahan masalah tersebut dan hasil yang akan diharapkan dari kebijakan tersebut dalam memecahkan masalah-masalah sosial.

Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan adalah apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

### 2.1.3 Evaluasi

Evaluasi merupakan kata yang disadur dari bahasa Inggris "*evaluation*" yang berarti taksiran atau nilai. Sedang dalam KBBI evaluasi berarti nilai. Lester dan Stewart (Leo Agustino: 2006) merumuskan evaluasi sebagai kegiatan yang melihat faktor-faktor penghambat suatu kebijakan atau program atau kegiatan, yang kemudian dapat dapat diketahui solusi serta dirumuskan kembali kebijakan baru yang lebih baik.

Wirawan (2012: 7) mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi suatu objek yang kemudian dinilai dan dibandingkan melalui indikator evaluasi dan hasil akhirnya digunakan unruk pengambilan keputusan objek tersebut.

Menurut Wirawan ada beberapa tujuan evaluasi yaitu mengukur pengaruh program terhadap masyarakat; menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana; mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar; evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menentukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan; pengembangan staf program; memenuhi ketentuan undang-

undang; akreditasi program; mengukur cost effectiveness dan cost efficiency; mengambil keputusan mengenai program; akuntabilitas; memberikan balikan kepada pimpinan dan program; mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi.

Ada 6 langkah dalam evaluasi menurut Edward A. Schuman yaitu: mengidentifikasi tujuan kegiatan yang akan dievaluasi, menganalisis masalah, mendeskripsikan dan menetapkan standar kegiatan, mengukur skala perubahan yang ada, menentukan penyebab dan akibat dari kegiatan tersebut, dan melihat indikator-indikator yang menentukan dampak terhadap kegiatan tersebut.

Dunn menyatakan bahwa dalam evaluasi kebijakan atau suatu kegiatan atau program dibutuhkan beberapa kriteria yang dapat mengukur keberhasilan kebijakan atau program atau kegiatan tersebut, sehingga Dunn merumuskan beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

a) Efektivitas.

Efektivitas berorientasi pada unit pelayanan. Dan dirumuskan dengan pertanyaan “Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?”. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti capaian tujuan atau keberhasilan tujuan atau hasil guna. Efektivitas melihat apakah hasil yang dicapai sesuai dengan hasil yang diinginkan. Tujuan dari efektivitas adalah melihat kinerja organisasi, progres program atau kegiatan apakah telah maksimal atau belum.

b) Efisiensi.

Efisiensi berorientasi pada unit biaya, manfaat dan rasio pembiayaan dan dirumuskan dengan pertanyaan “Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?”. Efisiensi berhubungan dengan rasionalitas ekonomi, dimana apakah usaha yang dilakukan dan modal usaha tersebut sesuai dan mampu mencapai tujuan atau target dari program atau kegiatan.

c) Kecukupan.

Kecukupan berkenaan dengan biaya tetap, efektivitas tetap dan dirumuskan dengan pertanyaan "Seberapa jauh modal yang ada bisa pencapaian hasil yang diinginkan?". Kecukupan merupakan indikator yang melihat tujuan sementara yang apakah sudah dirasa cukup, mampu memuaskan kebutuhan, nilai dan menumbuhkan kesempatan untuk progres yang lebih besar.

d) Perataan.

Perataan dalam evaluasi kebijakan berkenaan dengan keadilan yang dirasakan dan diperoleh sasaran kebijakan atau program atau kegiatan dan dirumuskan dengan pertanyaan "Apakah manfaat dari program atau kegiatan tersebut telah dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat?".

e) Responsivitas.

Dirumuskan dengan pertanyaan “Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?”, yang berfokus pada respon atau tanggapan oleh masyarakat.

f) Ketepatan.

Dirumuskan dengan pertanyaan “ Apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?” , yang berfokus pada perataan dan efisiensi program atau kegiatan tersebut.<sup>20</sup>

Agar evaluasi kebijakan yang dilakukan relat komprehensif, maka biasanya beberapa pertanyaan berikut ditanyakan:

- 1) Apakah kebijakan tersebut sudah sungguh-sungguh dijalankan?
- 2) Siapa yang membiayai pelaksanaan kebijakan tersebut?
- 3) Siapa yang akan menerima keuntungan?
- 4) Adakah duplikasi kebijakan dengan kebijakan lainnya?
- 5) Apakah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan standard an prosedur yang sah?<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah kegiatan mengukur nilai suatu program atau kegiatan atau objek tertentu dan dilakukan dengan memperhatikan acuan-acuan tertentu.

Penelitian ini akan menggunakan teori evaluasi Dunn yang menurut penulis sesuai dengan fenomena dan hasil yang diinginkan penulis, dimana menurut Dunn, evaluasi adalah proses menemukan informasi-informasi penting yang dapat dijadikan

<sup>20</sup> Irfan, Muh. 2014. *Kebijakan Publik*. Banten: Universitas Terbuka. Hal., 19

<sup>21</sup> Agusitino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung. Hal., 177



acuan tuk perumusan kebijakan atau perbaikan kebijakan di masa datang. Evaluasi juga menentukan apakah tujuan kebijakan atau program atau kegiatan telah dicapai dan sesuai sasaran.

Dunn mengatakan bahwa dalam evaluasi kebijakan terdapat beberapa karakteristik yaitu: *Pertama*, fokus nilai, dimana evaluasi adalah kegiatan untuk menentukan manfaat atau nilai guna. Oleh karena itu efektivitas merupakan poin penting dalam evaluasi. *Kedua*, interdependensi fakta-nilai, dalam evaluasi fakta selalu jadi acuan utama, yang bisa memperlihatkan pencapaian, kinerja, dan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaang kebijakan tersebut.

*Ketiga*, orientasi masa kini dan masa lalu. Evaluasi yang dilakukan pada masa kini dipengaruhi oleh kebijakan di masa lalu dan juga menentukan kebijakan yang akan hadir di masa depan. Evaluasi bersifat kesinambungan dan hasil evaluasi menentukan perkembangan ke depan suatu kebijakan atau program atau kegiatan.

*Keempat*, dualitas nilai. Dalam evaluasi nilai-nilai yang mendasari evaluasi memiliki nilai dan kualitas ganda. Dimana nilai tersebut dipandang sebagai tujuan sekaligus cara untuk memperbaiki kebijakan atau program atau kegiatan di masa depan. Evaluasi bisa disamakan dengan rekomendasi atau saran terhadap kebijakan. Hasil dari evaluasi bergantung pada tujuan dan sasaran yang dicapai.<sup>22</sup>

#### 2.1.4 Desa

---

<sup>22</sup> Prof.Said Zainal Abidin,Ph.D.,MPA. *Kebijakan Publik*. (Jakarta: Salemba Humanika:2016) Hlm.214

Desa adalah bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan telah ada sebelum kemerdekaan NKRI. Desa merupakan bagian penting dan subsisten yang telah hidup dan tumbuh dari masa lampau dan menjadi bagian dari pemerintah. Wilayah Indonesia didominasi oleh perdesaan.

Desa atau Desa adat atau sebutan lain adalah adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>23</sup>

Menurut Widjaja, Desa adalah integritas masyarakat hukum dan hidup dengan hal asal-usul istimewa serta mempunyai tatanan kehidupan asli. Desa maupun daerah sama-sama kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan masyarakat hukum diartikan sebagai suatu kesatuan yang memiliki kekuasaan dan organisasi pelaksana kekuasaan. Desa memiliki wilayah, kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan wilayahnya dan kepentingan masyarakat di dalamnya.

Pemerintahan Desa mengandung unsur masyarakat, biroktasi dan adat, berbeda dengan pemerintahan di atasnya. Desa merupakan organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government), sehingga desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat.

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa identik dengan masyarakat yang membentuk kesatuan hukum dan merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Desa melingkupi wilayah tugas dan kekuasaan yang kecil. Dan berada pada susunan paling bawah dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun Desa bukanlah bawahan Bupati atau Walikota.<sup>24</sup>

Desa memiliki kewenangan melekat atau atributif, yang terdiri atas:

- a) Memilih kepala desa dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa.
- b) Membentuk dan menetapkan susunan dan personil perangkat desa.
- c) Menyelenggarakan musyawarah desa.
- d) Menyusun dan menetapkan perencanaan desa.
- e) Menyusun, menetapkan dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f) Menyusun, menetapkan dan melaksanakan peraturan desa.
- g) Membentuk dan membina lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun lembaga adat.
- h) Membentuk dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).<sup>25</sup>

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam NKRI dan entitas asli bangsa Indonesia maka Desa berhak atas:

- a) pengakuan dan penghormatan atas keberagamannya dan keberadaannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI;

<sup>24</sup> Buku 5: Desa Membangun, Loc. It., Hal., 35

<sup>25</sup> Loc. It., Desa Membangun. Hal., 98

- b) kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c) kelestarian dan upaya untuk memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d) pemberian prakarsa, gerakan, demi terwujudnya partisipasi masyarakat Desa yang mendukung pengembangan potensi dan sumber daya Desa guna kesejahteraan bersama;
- e) pembentukan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f) upaya peningkatan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa yang mendukung kesejahteraan umum;
- g) upaya peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h) upaya memajukan ekonomi dalam rangka menekan angka kesenjangan ekonomi nasional dan;
- i) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan di Desa yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Desa. Dimana Pemerintah Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memiliki hak, wewenang serta kewajiban dalam mengurus dan mengatur urusan

pemerintahan dan urusan yang berkenaan dengan adat atau hak lokal, serta menjamin kepentingan masyarakat.

Pemikiran Pemerintahan Desa berlandaskan pada otonomi asli, corak keanekaragaman, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dan demokratisasi. Masyarakat desa berhak tumbuh dan merasakan perkembangan zaman dan modernitas global di segala bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, pendidikan, politik, teknologi dan sosial budaya. Namun diharapkan tidak menggerus nilai asli atau budaya-budaya lokal, seperti semangat gotong royong, kearifan lokal dan tradisi-tradisi lainnya.

Optimisme tentang perubahan desa merupakan semangat yang melandasi dan melekat kuat dalam UU tentang Desa. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa yang oleh dua pimpinan Pansus, Akhmad Muqowam dan Budiman Sujatmiko, disebut sebagai undang-undang “revolusioner” secara jelas meletakkan corpus (bangunan) desa baru yang berbeda dengan desa lama, pada dasarnya merupakan teorisasi baru tentang desa yang berbasis pada pengetahuan berjalan (walking knowledge), yang diperoleh dari banyak pengalaman-pelajaran di berbagai ruang dan waktu.<sup>26</sup>

Desa dikatakan mandiri apabila memenuhi syarat berikut sebagaimana yang dirumuskan oleh Mitra Samya:

- a) Mampu mengurus dan mengatur urusan sendiri dengan modal dan kekuasaan yang dimiliki;

---

<sup>26</sup> Eko, Sutoro. Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (Fppd). Hal., 12

- b) Memiliki perencanaan dan penganggaran yang baik sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan;
- c) Menjunjung aspirasi dan menggerakkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat;
- d) Mengelola sumber daya dan potensi Desa dengan optimal, transparan dan bertanggungjawab, yang diperuntukan demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Poin penting lainnya dan merupakan kekhasan dari Desa menurut Mitra Samya adalah demokrasi yang mengakar dan tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan.<sup>27</sup> Peraturan yang lebih khusus terkait Desa diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam peraturan tersebut mencantumkan tentang penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa.

### **2.1.5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

---

<sup>27</sup> Buku 5: Desa Membangun. Hal., 85

BUMDes merupakan badan yang memiliki wewenang mengelola dan mengembangkan potensi Desa dan sumberdaya Desa. BUMDes dibentuk melalui musyawarah Desa dan pengurusnya berasal dari masyarakat Desa setempat. BUMDes dapat melakukan kerjasama antarDesa atau antarprivat yang tujuannya tetaplah demi kemajuan Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Sebagai suatu badan inovasi yang dibentuk untuk menguatkan ekonomi Desa dan membantu perkembangan pembangunan Desa, BUMDes memegang posisi yang penting dan memang dibutuhkan Desa.

Menurut Dewi (2014) BUMDes adalah badan yang menjadi motor penggerak ekonomi Desa, membantu peningkatan sumber PADes, dan menstimulus peningkatan kesejahteraan Desa.

BUMDes memiliki dampak yang luas jika benar-benar berfungsi dan berjalan, dimana dapat menekan angka kemiskinan, mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Desa, membuka lapangan kerja, bisa membuka program atau kegiatan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, dan memberikan kontribusi pada PADes.

Pembentukan BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan untuk mengendalikan ekonomi Desa, meningkatkan penghasilan Desa, mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang mampu menyesuaikan kebutuhan dan potensi atau sumber daya Desa.

BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa melalui musyawarah Desa, dan dikelola oleh pengurus yang ditunjuk dan berasal dari masyarakat Desa (Ramadan, 2013). Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat desa. BUMDes merupakan penguar kebersamaan dan mengokoh semangat gotong royong yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Desa (Murwadi *et al.*, 2017). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan BUMDes merupakan rumusan dari seluruh lapisan masyarakat yang kemudian dipilih dan dikelola secara profesional.

Beberapa faktor penghambat ditemui dalam pengelolaan beberapa BUMDes yang secara umum melingkupi modal, sumber daya alam yang tidak ada, sumber daya manusia yang tidak memadai, kinerja pengurus dan pengelola BUMDes, partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat akan BUMDes, dan tekanan dari dalam ataupun luar BUMDes.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hidayah, Ulul, dkk. 2019. Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Kasus BUMDes Harapan Jaya Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. JSHP VOL. 3 NO. 2 2019 p-ISSN: 2580-5398 e-ISSN: 2597-7342 144 Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia



BUMDes juga merupakan wadah yang bertugas membangun kerjasama masyarakat, meningkatkan kesadaran sosial.<sup>29</sup> Keunikan BUMDes adalah mengedepankan nilai sosial, sehingga berbeda dengan badan usaha lain.

BUMDes berprinsip demokrasi, mengutamakan kebersamaan, kolektivitas, kepercayaan, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang membuka kesempatan belajar bagi masyarakat untuk mengetahui kapasitas manajerial, kepemimpinan, kepercayaan, kebersamaan, dan kewirausahaan. BUMDes dan modal sosial tidak dapat dipisahkan, hal ini berhubungan dengan upaya membangun Desa yang tetap memperharikan tradisi dan adat.

BUMDes dengan konteks politik lokal mempunyai hubungan timbal balik. BUMDes sulit berkembang dalam konteks desa yang bercirikan politik eksklusif, sebaliknya politik inklusif menopang BUMDes secara lebih baik. Di sisi lain, dengan ber- BUMDes, orang-orang desa tengah belajar membangun politik inklusif, yang paralel dengan membangun modal sosial, demokrasi dan tradisi berdesa.<sup>30</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes merupakan badan usaha milik Desa, dimana konsep milik Desa itu bermakna bahwa BUMDes juga terikat dengan segala hak asal usul, adat istiadat, dan kearifan lokal. BUMDes yang sukses bukan sekadar berhasil memberi kontribusi besar pada PADes tapi juga memberdayakan sumber daya manusia Desa dan memanfaatkan potensi Desa dengan maksimal.

## 2.2 Ulasan Karya Terdahulu

<sup>29</sup> Buku 5: Desa Membangun. Hal., 66

<sup>30</sup> Buku 5: Desa Membangun. Hal., 267

Penelitian ini membutuhkan penelitian terdahulu yang telah diuji kebenarannya, sebagai acuan untuk melihat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, berikut penulis sajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ulasan Karya

No.	Judul	Identitas	Ulasan Karya
1	Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): Studi Kasus Bumdes Harapan Jaya Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.	Jshp Vol. 3 No. 2 2019. Penulis: Ulul Hidayah, Sri Mulatsih, Yeti Lis Purnamadewi.  Fakultas Ekonomi Dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia	Berfokus pada pengelolaan dana BUMDes Harapan Jaya, dan manfaat dari program BUMDes tersebut yang belum menampakan pencapaian maksimal.  Metode yang digunakan metode kualitatif.
2	Evaluasi Penerapan Dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) Di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014– April 2015).	Jesp-Vol. 7, No 2 Nopember 2015  Penulis: Dendhi Agung Nugroho  Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang	Berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan yang diambil Bumdes untuk mengatasi masalah kesejahteraan di desa Babadan.  Metode yang digunakan metode kualitatif.
3	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa	Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076   1070  Penulis: Coristya	Berfokus pada usaha yang dilakukan BUMDes yang tidak berjalan sama sekali, sehingga dapat dikatakan eksistensi dari BUMDes tersebut hanya sebatas papan nama

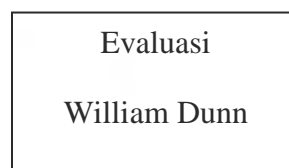
	(Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)	Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo  Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang	saja.  Metode yang digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
4	Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada Bumdes Di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik)	Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No 1, Hal. 1-5  Penulis: Rizka Hayyuna, Ratih Nur Pratiwi, Lely Indah Mindarti  Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang	Berfokus pada strategi manajemen aset yang dilakukan oleh BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa. Metode yang digunakan metode penelitian kualitatif.
5.	Analisis Pelaksanaan Program Social Enterprise Di Bumdes Nglanggeran.	Working Paper Keuangan Publik Islam No. 5 Seri 1 Tahun 2018  Penulis: Yofais Ahgio Khosyi, Alfian Nurrohman, Rizqi Anfanni Fahmi  Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.	Berfokus pada social enterprise Bumdes Nglanggeran yang mana sangat berperan dalam berkembangnya perekonomian Masyarakat di desa nglanggeran itu sendiri.  Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif.
6.	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau,	Penulis: Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo  Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu	Berfokus pada keberadaan badan usaha milik desa (bumdes) sebagai penguatan ekonomi Desa.  Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

	Kabupaten Malang)	Administrasi, Universitas Brawijaya Malang	pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian: Keberadaan badan usaha milik desa, kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa dan faktor penghambat dan pendukung.
7.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Gentuma Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo	Penulis: Harun Blongkod, Herlina Rasjid Program Studi/Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2017	Berfokus pada upaya pemberdayaan yang dilakukan BUMDes terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

#### Bagan 2.1

#### Alur Evaluasi Kegiatan BUMDes



Evaluasi  
William Dunn





Sumber: olahan penulis 2020

## 2.4 Konsep Operasional

Untuk mempermudah mengartikan dan memahami istilah dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu mengoperasionalkan atau memberi batasan penelitian mengenai konsep-konsep dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebijakan merupakan apa yang dilakukan dan/atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang memiliki tujuan tertentu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
- 2) Evaluasi merupakan tahapan akhir sebuah kebijakan. Evaluasi adalah kegiatan melihat dampak, nilai, atau akibat dari suatu kebijakan.
- 3) Desa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>31</sup>

- 4) Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.<sup>32</sup>
- 5) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa<sup>33</sup>.
- 6) Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
- 7) Efisiensi berkenaan dengan jumlah modal yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
- 8) Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan.

<sup>31</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>32</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>33</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- 9) Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.
- 10) Responsivitas dapat juga dikatakan respon dari suatu aktivitas.
- 11) Ketepatan merujuk pada apakah suatu kebijakan telah tepat untuk dilaksanakan dan merujuk pada landasan atau alasan kebijakan itu ada.

## 2.5 Operasional Variabel

Berikut adalah tabel operasional variabel pada penelitian ini:

**Tabel 2.2 Operasional Variabel**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
William Dunn (Agustino: 2006) mengatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui nilai-nilai atas suatu kebijakan atau program atau kegiatan yang telah dilakukan yang kemudian dijadikan	Evaluasi Kebijakan	1. Efektifitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Perataan	Unit Pelayanan. Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost-benefit. Biaya tetap, efektifitas tetap. Penyebaran manfaat. Respon

acuan untuk perbaikan atau acuan dalam pembuatan kebijakan atau program atau kegiatan baru.		5. Responsivitas  6. Ketepatan	masyarakat.  Program publik harus merata dan efisien.
---	--	--------------------------------------	---

Sumber: Dunn dan modifikasi Penulis 2020



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan model analisa deskriptif (descriptive reseach). Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan karakter suatu objek, fenomena, kegiatan, kelompok yang terjadi di masyarakat.



Proses penelitian kualitatif dilakukan secara cermat untuk mendapatkan fakta-fakta yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh data yang lengkap.<sup>34</sup> Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami dan menilai fenomena atau gejala sosial yang ada dengan pemaparan atau penggambaran yang jelas dan berdasarkan fakta dan data.<sup>35</sup>

Secara umum, penelitian deskriptif bertujuan untuk: mendeskripsikan proses, hubungan antarobjek, mekanisme, penelitian; memberikan gambaran verbal dan profil yang akurat; menginformasikan penjelasan yang sesuai fakta dan data di lapangan; menguraikan latar belakang masalah dari gejala sosial; menguraikan rangkaian peristiwa dan tahapan pada suatu objek; mendokumentasikan informasi yang diperoleh.<sup>36</sup>

### 3.2 Informan Penelitian

Adapun Informan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

NO.	Informan	Status	Jumlah	Nama
1.	Kepala Desa	Key informant	1	
2.	Direktur BUM Desa	Key informant	1	Andy
3.	Bendahara BUM Desa	Key informant	1	Silpa
4.	Ketua BPD	Informan penunjang	1	

<sup>34</sup> Muslimin. 2002. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Malang: Bayu Media & Umm. Hal., 2

<sup>35</sup> V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru: Yogyakarta, 2018, Hal., 20

<sup>36</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2015, Hal., 197

5.	Nasabah BUM Desa	Informan penunjang	2	Indah Ra
6.	Masyarakat	Informan penunjang	4	Senda Hayati
7.	Mitra Kredit Barang	Informan penunjang	1	Edo
Jumlah			13 orang	

*Sumber : Data Olahan Penulis*

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Ada dua data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data pokok yang didapatkan di lapangan, berupa fakta dan data-data, yang diperoleh melalui wawancara dengan informan-informan yang berkenaan. Selanjutnya adalah data sekunder berasal dari studi kepustakaan yang didapat dari buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, Informan adalah orang yang menjadi sumber data di dalam penelitian yang berhubungan langsung dengan permasalahan dan mampu memberikan informasi yang akurat kepada peneliti.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dimana wawancara dilakukan langsung, dengan menanyai informan atau narasumber

pertanyaan-pertanyaan yang berkenang dengan objek penelitian. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama yang selanjurnya didukung dengan dokumentasi, arsip-arsip, daftar inventaris dan laporan tertulis yang berkenang dengan objek penelitian. Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian, baik itu diperoleh dalam buku, catatan, surat kabar, transkrip, notulen rapat, majalah, agenda, legger, prasasti dan sebagainya.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif (*qualitative data analysis*) yang menghasilkan data dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis, catatan, dan kutipan-kutipan. Secara umum, proses analisa data kualitatif melibatkan empat proses penting yaitu *Pertama*, reduksi data (*data reduction*) atau mengumpulkan data kemudian diolah. Dimana peneliti mengategorikan data-data dan memilah data dalam beberapa konsep, tema dan kategori tertentu.

*Kedua*, penyajian data berupa tabel, bagan, matrik, grafik, dan atau jaringan sehingga memudahkan dalam mengetahui dan membaca informasi serta mengambil kesimpulan. *Ketiga*, langkah akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, dimana peneliti mencari garis besar dan makna dari setiap fenomena yang ada dalam hasil penelitian untuk disajikan lebih ringkas, padat dan jelas.

### 3.6 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Elok Basamo Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Adapun alasan memilih BUMDes tersebut karena BUMDes Elok Basamo memiliki banyak unit kegiatan atau program namun belum bias mencapai tujuan dibentuknya BUMDes tersebut, salah satunya mencapai target PADes.

### 3.7 Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2020/ Bulan/ Minggu															
		Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X	X	X	X												
2	Seminar UP					X											
3	Revisi UP					X											
4	Riset							X	X	X							
5	Pengolaan dan Analisa Data									X	X						
6	Bimbingan Tesis											X	X				

7	Perbaikan Bab per Bab														X	X		
8	Ujian Tesis																X	
9	Perbaikan Tesis																	X

Sumber: Modifikasi Penulis 2020



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### 4.1.1 Desa Penyasawan

Penyasawan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Desa ini dikenal dengan masyarakat yang majemuk. Kata Penyasawan berasal dari kata manyosou/ mencari ikan karena Desa Penyasawan merupakan Desa yang berada di pinggir aliran sungai Kampar.

Desa Penyasawan pada mulanya adalah berasal dari Kenegerian Air Tiris yang merupakan Rukun Kampung (RK), dan pada tahun 1967 RK Penyasawan dimekar menjadi Desa Penyasawan, Kepala Desa pertama yaitu M. Yusuf.

Jumlah penduduk keseluruhan adalah 5.814 dimana laki-laki 1.124 orang dan perempuan 2.904 orang dengan jumlah KK sebanyak 1.124 KK. Adapun batas wilayah Desa Penyasawan sebelah utara yaitu Desa Pulau Jambu, sebelah selatan yaitu Desa Siabu, sebelah barat yaitu Desa Ranah dan sebelah timur yaitu Desa Rumbio dan Pulau Sarak. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat adalah 3 KM dengan jarak tempuh 10 menit, dan jarak ke ibukota Kabupaten adalah 12 KM dengan jarak tempuh 40 menit. Di Desa Penyasawan terdapat 3 TK/PAUD, 4 SD/MI, 1 SLTA/MA.

Desa Penyasawan terbagi atas 4 dusun yaitu:

- 3) Dusun Penyasawan Timur: Jumlah 6 RT
- 4) Dusun Penyasawan Barat: Jumlah 8 RT
- 5) Dusun Penyasawan Selatan: Jumlah 10 RT
- 6) Dusun Pontianak: Jumlah 6 RT.

Berikut adalah periodesasi pergantian jabatan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Penyasawan Kampar:

Tabel 4.1 Periodesasi Pergantian Kepala Desa dan Sekretaris Desa

Penyasawan<sup>37</sup>

No.	Kepala Desa	Sekretaris Desa	Masa Jabatan
-----	-------------	-----------------	--------------

<sup>37</sup> Data Pemerintah Desa Penyasawan 2020

1	M. Yusuf. J	Anas. M	1967-1986
2	Alisman	Anas. M	1986-1989
3	Badu Djafar	Anas. M	1990-1998
4	Pj. Anas. M		1998-2000
5	Fadhil	Anas. M	2000-2008
6	Sumarlis	Anas. M	2008-2014
7	Pj. M. Farid Ridha	Anas. M	2014 – 2015
8	Sumarlis	Anas. M	2015-2021

Berikut adalah keadaan Monografi Desa Penyasawan:

Tabel 4.2 Monografi Desa Penyasawan<sup>38</sup>

No.	Area	Luas
1	Pemukiman	151.5 ha
2	Pertanian Sawah	125 ha
3	Ladang/tegalan	5 ha
4	Rawa-rawa	1 ha
5	Perkantoran	0,25 ha
6	Sekolah	3.50 ha
7	Jalan	7.75 ha
8	Lapangan sepak bola	1 ha

<sup>38</sup> Data Pemerintah Desa Penyasawan 2020

Kondisi kultur budaya di Desa Penyawasan sangat beragam dan terdapat beberapa suku antaranya suku putopang basa, piliang, domo, putopang pulau, putopang limo abuong, daliong bukik dan kampai.

#### **4.1.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Elok Basamo Penyawasan**

BUMDes Elok Basamo merupakan BUMDes yang berada di Desa Penyawasan dan secretariat sekaligus keday barang hariannya berada di pinggir jalan lintas Pekanbaru-Bangkinang. BUMDes ini berada di lokasi strategis yaitu di pertengahan Desa Penyawasan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Desa Penyawasan.

BUMDes Elok Basamo berdiri sejak Desember 2016. BUMDes Elok Basamo didirikan atas landasan Peraturan Desa Penyawasan Nomor 003 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Penyawasan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Pendirian BUMDes Elok Besamo bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa, membuka lapangan kerja, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi Desa, mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pemerataan ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan



pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Hasil Desa.

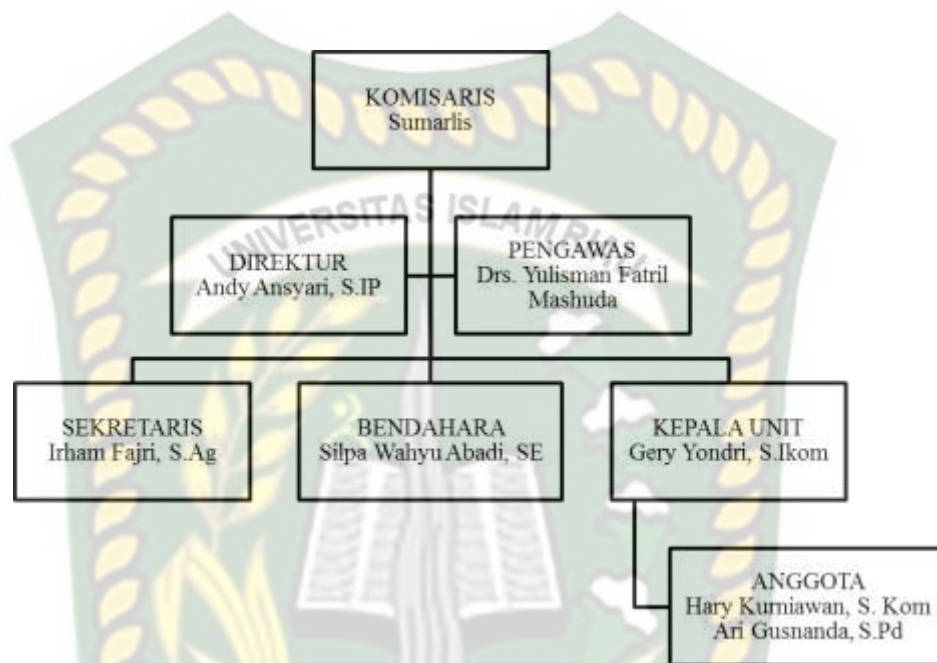
Setiap badan organisasi atau pun perusahaan mempunyai tujuan atau kehendak yang telah ditetapkan jauh sebelumnya dalam proses perencanaan. Langkah utama dalam mencapai tujuan adalah merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta mencerminkan unsur kejelasan dan fleksibel. Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi mencapai tujuan.

Proses perencanaan struktur organisasi ini membuat gambaran, pengaturan dan pengklasifikasian tugas, tanggung jawab dan serta wewenang personal serta bagian dari seksi yang ada pada organisasi. Disamping itu di dalam struktur harus pula menggambarkan jaringan-jaringan koordinasi atau fungsi dan seluruh aktivitas organisasi yang satu dengan yang lainnya saling terkait.

Dengan demikian struktur organisasi yang menata proses dan mekanisme kerja dan sekaligus memungkinkan pemilihan strategi dan kebijaksanaan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara lebih sehat dan efektif.

Berikut adalah struktur organisasi kepengurusan BUMDes Elok Basamo yang tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Desa Penyasawan Nomor 003 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pengurus BUMDes Elok Basamo<sup>39</sup>



Bagan di atas merupakan bagan struktur organisasi BUMDes Elok Basamo Desa Penyasawan. Terlihat pada bagan bahwa Komisaris bertindak sebagai penasehat. Kemudian Pengawas merupakan unsur kepengurusan yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan BUMDes sesuai dengan AD dan ART yang telah ditetapkan.

<sup>39</sup> Data BumDes Elok Basamo 2019

Pengawas dalam menyelenggarakan tuangnya bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa. Sementara itu, Direktur mempunyai tugas memimpin pengelolaan sumber daya BUMDes yang dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan Kepala Unit yang dilengkapi dengan anggota pelaksana harian. Pada bagan juga terlihat bahwa tingkat pendidikan pengurus rata-rata adalah sarjana, sehingga dinilai cukup cakap dan mampu melaksanakan seluruh kegiatan BUMDes Elok Basamo.

Dalam penyusunan dan pembuatan administrasi BUMDes Elok Basamo telah menggunakan sistem komputerisasi dan manual. Penggunaan sistem komputerisasi meliputi pencatatan keuangan dan data-data kredit barang. Untuk manual berupa data angsuran kredit. Arsip, buku inventarisasi, dan dokumentasi BUMDes Elok Basamo juga tersedia dan rapi. Untuk informasi kepengurusan di tempel di dinding Sekretariat BUMDes begitupun dengan informasi kredit barang.

Unit kegiatan yang dilaksanakan BUMDes Elok Basamo ada 3 yaitu: tambak ikan, keday harian dan kredit barang. Tambak ikan telah berlangsung sejak 2017 dan berhenti beroperasi sejak akhir 2019 karena kerugian panen. Keday harian telah berlangsung sejak 2019. Sedangkan kredit barang telah berlangsung sejak 2019 akhir.

#### **4.2 EVALUASI KEGIATAN BUMDES ELOK BASAMO**

Evaluasi merupakan bagian penting dari kebijakan. Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu kebijakan, untuk

mengetahui apakah kebijakan itu telah tercapai atau belum. Tahapan dalam evaluasi yaitu proses pengumpulan data, proses analisis data, dan proses penyajian data.

Kegiatan evaluasi ini sangat penting, karena menentukan apakah suatu kebijakan baik atau tidak, apakah kebijakan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak, serta apakah kebijakan yang dibuat tepat sasaran atau tidak, apakah kebijakan tersebut bermanfaat untuk masyarakat atau tidak. Evaluasi juga dapat mengantarkan kita untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat kebijakan.

Hasil dari evaluasi dapat dijadikan acuan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa datang. Evaluasi yang baik memberikan informasi yang terpercaya dan valid, memberikan masukan pada kajian serupa, dan memberikan kontribusi berupa rekomendasi dan kritik yang menjadi dasar perbaikan tujuan kebijakan.

Edward Suchman merumuskan beberapa langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu: (1) menemukan masalah, (2) mengidentifikasi tujuan kebijakan yang sedang dievaluasi, (3) mendeskripsikan masalah, (4) membandingkan antara tujuan yang tercapai dengan tujuan yang seharusnya, (5) menemukan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat, (6) melihat dampak dari kebijakan tersebut.<sup>40</sup>

Dewasa ini BUMDes menjadi badan yang dibutuhkan dan badan strategis yang berperan untuk meningkatkan perekonomian Desa. Pengelolaan BUMDes

---

<sup>40</sup> Eko Handoyo. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, Hal 151

sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. BUMDes dapat menjalankan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang berpeluang meningkatkan ekonomi Desa serta memanfaatkan potensi Desa<sup>41</sup>

Penelitian ini menempatkan kegiatan BUMDes sebagai objek penelitian, sebagaimana yang kita tahu bahwa BUMDes menjadi salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian DPDTT dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Penelitian ini diharapkan mengetahui apakah dengan adanya BUMDes sebuah Desa menjadi mandiri dan sejahtera, kemudian apa saja faktor yang menjadi pendukung dan pendorong keberhasilan dari BUMDes Elok Basamo.

Pada penelitian ini, peneliti membahas evaluasi 3 BUMDes Elok Basamo Desa Penyasawan yaitu 1) tambak ikan lele, 2) keday harian dan 3) kredit barang dengan pisau analisa menggunakan Teori Evaluasi Dunn yang terdiri atas 7 indikator.

Dimana item penilaiannya terdiri dari:

- 1) efektivitas terkait tujuan dari pendirian BUMDes Elok Basamo,
- 2) efisiensi terkait pembiayaan, manfaat kegiatan, dan rasio,
- 3) responsivitas terkait respon masyarakat atas kegiatan BUMDes Elok Basamo,

---

<sup>41</sup> Ni Putu Ade Novita Adnyani, Ida Bagus Ketut Surya. 2019. Peran Mediasi Motivasi Kerja Pada Pengaruh Kompensasi Terhadap Semangat Kerja Di Bumdes Udaka Dawan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali

- 4) ketepatan adalah apakah semua kegiatan yang dilakukan telah tepat sasaran,
- 5) ketepatan yaitu berkenaan dengan hasil (tujuan) yang diinginkan berguna bagi masyarakat,
- 6) kecukupan adalah tujuan sementara yang apakah sudah dirasa cukup.

#### 4.2.1 Efektivitas.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti hasil guna, capaian hasil, atau tujuan yang telah berhasil. Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan atau program atau kegiatan telah efektif maka dirumuskan pertanyaan “ Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?” , indikator ini yang berfokus pada tujuan dari BUMDes Elok Basamo, dan sebagaimama tercantum dalam AD ART ada beberapa tujuan dari dibentuknya BUM Desa Elok Basamo yaitu:

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa.
- 2) Mengoptimalkan asset Desa.
- 3) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- 4) Membuka lapangan kerja.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Hasil Desa.

Dari beberapa tujuan di atas, kami mencoba menanyakan kepada narasumber apakah tujuan tersebut telah tercapai. Berikut ini hasil wawancara Penulis dengan Bendahara BUMDes Elok Basamo, Bapak Silpa:

"Kalau ditanya tujuan BUMDes kita apakah sudah tercapai, saya jawab sudah, namun tidak maksimal, contoh penyerapan tenaga kerja ya karena kita Badan yang kecil, untuk ditambah hingga akhir 2019 ada 4 orang, 2 orang pertambah, tapi tambah kita sudah stop akhir 2019 karena hasil jual panen merosot. Di keday harian ada 2 juga. Kontribusi ke APBDes kita juga kecil, pertahun Rp 1.000.000,00. Dari segi membantu masyarakat kita sudah ada kredit yang tidak menekankan pada bunga, kredit kia sistemnya bagus dan tidak memberatkan masyarakat". (Hasil wawancara pada 08 Agustus 2020 pukul 10.00 Wib).

Kemudian penulis juga mewawancari Direktur BUMDes, Bapak Andy: "Sejauh inu tujuan BUMDes sudah tercapai, tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kebutuhan masyarakat dengan unit usaha kredit barang, artinya BUMDes di sini berperan sebagai penolong masyarakat yang dengan sistem kredit, dengan tidak membebankan masyarakat dalam hal angsuran yang tinggi, kita berusaha agar masyarakat terbantu, kita sediakan unit ini jadi masyarakat bisa mengajukan mau kredit apa.". (Hasil wawancara pada 08 Agustus 2020 pukul 13.00 Wib).

Penulis juga menanyakan hal serupa pada Kepala Desa Penyasawan yaitu Bapak Sumarlis, berikut pernyataan beliau: " Menurut saya selaku Kepala Desa Penyasawan tujuan dari BUMDes Elok Basamo yang banyak itu, yang tertuang dalam Peraturan Desa itu belum tercapai, masih banyak kelemahan-kelemahan, memang ada penyerapan tenaga kerja ada 4 orang seingat saya, tapi itu menurut saya masih jalan di tempat sejak didirikan." . (Hasil wawancara pada 09 September 2020 pukul 10.00 Wib).

Lebih lanjut Kepala Desa juga menyatakan: ” *Dalam hal meningkatkan dan membantu perekonomian Desa menurut saya belum Nampak, memang ada yang terbantu para pekerja mereka, para pengurus juga dapat intensif, namun seara keseluruhan belum bisa dirasakan masyarakat apalagi Desa. Padahal penyertaan modal paling sedikit dari Desa itu 75 juta sekali kucur, angka total 448 juta itu banyak. Kita meminta pihak BUMDes itu untuk lebih serius, kesungguhan mereka dalam mengelola itu. Agar tujuannya bisa dirasakan masyarakat dan Desa secara keseluruhan.*” , ujar Kepala Desa. (Hasil wawancara 09 September 2020).

Bapak Edy Yusni selaku Ketua BPD menyatakan bahwa, "*Untuk tujuan saya rasa belum tercapai maksimal. Tapi mereka sudah berusaha, sudah berproses. Setahu saya keday itu juga ramai orang beli, karena di tepi jalan. Kalau dulu mereka panen itu banyak ikannya.*". (Hasil wawancara pada 12 September 2020 pukul 17.00 Wib).

"*Saya tidak tahu ya tentang tujuan itu, saya tahunya dari BUMDes itu ada keday, dan kredit itu saja, tapi saya tidak terlibat kredit. Paling cuma ke keday beli bensin. Dan terbantu juga dengan adanya pom mini itu, tidak perlu ke spbu lagi, juga harganya tidak mahal kali.*", tutur saudari Senda salah seorang warga. (Hasil wawancara pada 26 Agustus 2020 pukul 11.00 Wib).

Penulis juga menanyai Saudari Ranti, berikut adalah hasil wawancaranya: "*Saya ikut kredit. Tapi kalau tujuan saya tidak tahu. Cuma dengan kredit itu membantu saya juga warga lain banyak yang ikut.*". (Hasil wawancara pada 30 Agustus 2020).



Berikut hasil wawancara kami dengan Saudari Senda, "*Saya tahu Bumdes itu karena letaknya di tepi jalan. Jadi, sering beli juga ke sana. Selain itu ada juga program mereka yang kredit barang, itu banyak diceritain warga, karena kita bisa kredit apa saja.*". (Hasil wawancara 26 Agustus 2020).

Kemudian Saudari Hayati mengatakan, "*Tujuan saya nggak tahu rincinya, tapi kredit barang tahu, itu memudahkan masyarakat, apalagi masyarakat desa kita banyak yang buruh tani, buruh kuli.*". (Hasil wawancara 26 Agustus 2020 pukul 17.00 Wib).

Dalam hal kontribusi BUMDes Elok Basamo hanya dikisaran Rp 1.000.000 pertahun, angka yang kecil sekali mengingat banyaknya kegiatan yang dikelola BUMDes Elok Basamo dan besaran modal yang telah dikucurkan untuk kegiatan BUMDes. BUMDes yang kuat secara kelembagaan dan ekonomi dicirikan dengan salah satunya besaran kontribusi pada PADes, namun kontribusi BUMDes Elok Basamo masih minim, dan belum mampu mencapai tujuan membantu peningkatan PADes dan pendapatan masyarakat.

Sedangkan kegiatan kredit barang yang penyerapannya sudah maksimal, namun pihak BUMDes harus melakukan sosialisasi kembali mengingat ada masyarakat yang ragu bahkan tidak tahu ada kredit barang dan ada juga masyarakat yang belum membayar satu sen pun hingga Agustus 2020. Padahal jika dana yang

ada terserap banyak, selain meningkatkan pemasukan BUMDes juga membantu masyarakat yang membutuhkan.

Untuk kegiatan keday barang harian menurut penulis kegiatan tersebut telah berjalan baik, mengingat keday dengan ukuran kecil itu telah mempekerjakan 1 orang karyawan dan mendapatkan pendapatan Rp 250.000,00 hingga Rp 500.000,00 perhari, selain itu juga keday tersebut terletak di dusun pertengahan tepat di pinggir jalan lintas Pekanbaru-Bangkinang yang mudah diakses.

Penulis menilai kurangnya manajemen dalam pengelolaan BUMDes, mengingat modal yang besar dan kegiatan yang banyak. Untuk kegiatan tambak ikan yang diberhentikan sejak akhir 2019 karena kendala harga jual dan pembeli menurut penulis bisa disiasati, apalagi ikan adalah bahan baku makanan pokok. Apalagi pihak BUMDes telah memiliki kolam, sangat disayangkan akhirnya tambak yang sudah memiliki pekerja harus diberhentikan.

Terdapat beberapa unsur manajemen BUMDes yang perlu diperhatikan (Gunawan, 2013) yaitu: (1) Man. Manusia atau SDM merupakan unsur penting dalam manajemen BUMDes, dimana potensi, energi, dan ide manusia sangat diperlukan. Dalam BUMDes Elok Basamo SDM sudah memadai, terlihat bahwa sebagian besar pengurus adalah sarjana, hanya saja ide-ide yang strategis dan inovatif belum lahir dan tercetuskan.

(2) Money. Uang atau modal yang dikelola dengan tepat akan menjadi sumber daya yang menjanjikan, BUMDes Elok Basamo memiliki modal yang besar namun

pada BUMDes Elok Basamo masih belum dikelola dengan tepat, terlihat dalam kegiatan tambak ikan yang merugi, dan keday harian yang belum stabil.

(3) Material. Bahan baku berupa sarana dan prasarana yang memadai juga dibutuhkan dalam manajemen BUMDes dan menurut observasi penulis, BUMDes Elok Basamo telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti lokasi keday harian yang strategis dan kolam tambak.

(4) Method. Metode atau teknik atau prosedur yang sistematis dan tepat juga jadi hal penting dalam manajemen BUMDes. Pada pelaksanaan kegiatan BUMDes Elok Basamo perlu ditingkatkan lagi prosedurnya, terutama kredit barang yang belum membuat tindakan tegas bagi penunggak.

(5) Market. Pasar sebagai tempat penyaluran produk dan jasa sangat dibutuhkan apalagi oleh badan usaha seperti BUMDes. Dalam pelaksanaan kegiatan tambak ikan kegagalan dikarenakan harga jual ikan dipasaran yang jatuh, hal ini menandakan bahwa pasar sangat menentukan keuntungan.

Kemudian peneliti menanyakan terkait kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dilakukan oleh pengurus BUMDes Elok Basamo dan atau Pemerintah Desa untuk mencapai dan meningkatkan tujuan dari pendirian BUMDes Elok Basamo.

*"Kebijakan yang kita ambil selalu memikirkan masyarakat apalagi di sekitar Penyasawan. Kita buat keday harian di tepi jalan raya biar mudah diakses semua, letaknya juga di dusun tertengah. Masyarakat juga turut membantu, semua yang kredit rata-rata bayarnya tepat waktu, pihak kami juga rutin mendatangi rumah*

warga setiap rabu sore, di sini hari pasar kamis, jadi rata-rata masyarakat yang buruh tani atau buruh bangunan itu nerima gaji perminggu di hari rabu, kita buat kebijakan jemput uang kredit setiap rabu, agar masyarakat tahu dan tertib". Ujar Bapak Silpa. (Hasil wawancara pada 08 Agustus 2020).

Berikut jawaban dari Kepala Desa adalah sebagai berikut: “ *Kebijakan ya.. kita dari Desa bantu kucurkan dana, kucuran dana dari Desa sudah 5 kali dengan total 440 Juta. Selain itu kami juga rutin memantau, menanyakan progress ke Andy dan Silpa, kami juga ada beberapa pertemuan rutin. Kami juag meminta mereka para pengurus untuk melihat dan mengadopsi atau mencontoh kebijakan yang dilakukan BUM Desa yang sudah sukses, memotivasi gitu.*” . (Hasil wawancara pada 09 September 2020).

Sedang Bapak Andy menyatakan bahwa, ” *Sekarang kita fokus di kredit, dan keuntungan dari itu juga sedikit, kita akan maksimalkan penyerapannya.*” . (Hasil wawancara pada 08 Agustus 2020)

“*Kita fokus ke kredit barang. Sejak awal kita sudah buat kebijakan harus kredit barang, jadi kita bayarkan, masyarakat milih mau kredit apa, mitra kita ada 2 Edo Ponsel dan Sulay Elektronik, karena itu yang banyak diminta masyarakat. Apalagi pandemi ini kredit hp meningkat.*”. Ujar Bapak Silpa. (Hasil wawancara pada 08 Agustus 2020).

Lebih lanjut Kepala Desa juga menyatakan bahwa: “ *Ke depannya pihak Desa berharap BUMDea Elok Basamo itu sesuai namanya Elok Basamo, baik untuk bersama, bisa mengangkat ekonomi masyarakat dalam penyerapan tenaga kerja,*

*pengurus juga harus ditingkatkan lagi niat dan kesungguhannya agar bisa membuat kegiatan yang benar-benar fokus dan bisa menghasilkan. Masyarakat juga partisipasinya ditingkatkan dan bisa sadar akan kehadiran BUMDes itu, tahu gitu, ada rasa memiliki. Desa juga terus berusaha mengatur penyertaan modal ya, kita akan dukung apapun, kita akan bantu juga cari penanam modal lainnya.” (Hasil wawancara 09 September 2020).*

Pernyataan di atas menunjukkan tidak adanya strategi khusus padahal ada beberapa strategi manajemen aset BUMDes yang dapat meningkatkan efektifitas kegiatan BUMDes (Hayyuna dkk, 2014) yang terdiri dari mengamati lingkungan, penyusunan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi atau kontrol dalam kaitannya dengan pengelolaan aset desa.

Adapun strategi yang digunakan oleh BUMDes diantaranya meliputi strategi pengembangan produk, penetapan harga dan strategi keuangan. Faktor penghambat dari strategi manajemen aset yang sering kali ditemui dan dilakukan BUMDes yaitu mengenai kesulitan dalam melakukan pengembangan usaha baru, terbatasnya inovasi dalam mengembangkan produk lokal, kurangnya sarana pemasaran, terbatasnya dana dan dukungan dari Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak tujuan tujuan pendirian BUMDes belum bisa dikatakan tercapai, namun sedang berproses tuk mencapai. Penyerapan tenaga kerja yang sejauh ini hanya beberapa orang. Adapun dalam hal terkait kebijakan-kebijakan dari pihak BUMDes, mereka hanya akan berfokus pada kegiatan kredit barang yang dirasa bisa meningkatkan kontribusi

dan membantu masyarakat secara langsung dan nyata. Begitupun dari pihak Desa mereka berupaya memberi bantuan berupa modal dan saran-saran agar ke depannya pihak BUMDes lebih sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan BUMDes.

#### 4.2.2. Efisiensi.

Efisiensi secara sederhana diartikan sebagai ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu. Menurut Dunn efisiensi berkenaan dengan biaya, manfaat bersih dan rasio cost benefit. Berikut adalah modal kegiatan BUM Desa Elok Basamo:

**Tabel 4.3 Pengucuran Dana Dari Pemerintah Desa  
ke BUMDes Elok Basamo Tahun 2017-2019<sup>42</sup>**

No	Pengucuran Dana Ke-	Rupiah	Sumber	Peruntukan
1	Pengucuran I	65.000.000,-	Dana Desa	Modal tambak lele dan pelet.
2.	Pengucuran II	100.000.000,-	Dana Desa	Modal tambak lele, pelet, pendirian sekre dan keday barang harian.
3	Pengucuran III	50.000.000,-	Dana Desa	Modal keday harian.
4.	Pengucuran	95.000.000,-	Dana Desa	Modal keday harian.

<sup>42</sup> Data BumDes Elok Basamo 2020

	IV			
5.	Pengucuran V	138.000.000,-	Bantuan Khusus Keuangan Pemerintah Provinsi Riau	Modal kredit barang.
<b>Jumlah</b>		<b>448.000.000,-</b>		

Sejak awal 2017 hingga akhir 2019 BUMDes Elok Basamo telah mengelola dana sebesar Rp 448.000.000,- yang dikucurkan dalam 5 tahap. Menurut keterangan Bapak Andy dana pada pengucuran pertama Rp 65.000.000,- dijadikan untuk modal tambak ikan dan jualan pelet yang juga pelet tersebut dijadikan untuk pemenuhan kebutuhan tambak. Kemudian pada pengucuran kedua Rp 100.000.000,- dibagi 2 yang mana Rp 53.000.000,- untuk modal tambak masa kelola 2018-2019 dan sisanya Rp 47.000.000,- untuk pendirian sekretariat BUMDes.

Keuntungan tambak sebesar Rp 17.000.000 dijadikan modal tambahan untuk pendirian keday barang harian. Dimana keday tersebut berada 1 gedung dengan sekretariat BUMDes. Menurut Bapak Silpa modal awal keday harian itu sekitar Rp 35.000.000,- dan dana sebesar Rp 18.000.000,- didapat dari perguliran dana ketiga. Kemudian untuk perguliran dana ketiga yang masih tersisa dijadikan modal untuk kebun Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Menurut keterangan Bapak Andy kebun Desa merupakan tanggungjawab Pemerintah Desa, namun karena satu dan lain hal maka dana yang didapat BUMDes pada perguliran ketiga sebesar Rp 32.000.000,- dijadikan modal kebun Desa.

Pengucuran keempat dijadikan untuk modal keday harian dan pengucuran kelima dijadikan modal kredit barang.

### 1) Kegiatan Tambak Ikan

Kegiatan tambak ikan pertama kali dilakukan pada tahun 2017 awal. Masa panen ikan lele 8 hingga 9 bulan dan estimasi panen yang besar membuat pihak BUMDes memutuskan untuk melakukan kegiatan tambak ikan lele. Modal awal tambak lele sebesar Rp 65.000.000,- berasal dari dana Desa. Terdapat 2 kolam tambak, dimana lokasi pertama dikelola 1 orang dan lokasi kedua dikelola 2 orang.

Pada panen pertama untuk masa kelola tambak 2017-2018 dengan jumlah bibit 10.000 ekor tambak mendapatkan keuntungan Rp 17.000.000,- yang kemudian dibagi 2 dengan pengelola yang juga merupakan masyarakat setempat, 1 bagian untuk BUMDes dan 1 bagian untuk pengelola. Lebih lanjut Bapak Andy mengatakan bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya pengelolaan tambak pada warga dan pihak BUMDes hanya memantau perkala.

Pada tahun kedua kegiatan tambak yaitu tahun 2018-2019 mengalami kerugian yang besar karena harga ikan yang turun dan harga pelet yang naik.

"Tahun kedua tambak dengan jumlah bibit yang sama, kita rugi karena pakan pelet naik, dan harga jual ikan waktu panen turun. Kita putuskan untuk stop dulu tambak, nanti kalau ada modal kita buat lagi. Sekarang fokus ke keday dan kredit barang dulu.", demikian hasil wawancara dengan Bapak Andy.



Pihak BUMDes mengaku kewalahan mencari pembeli yang menawarkan harga yang bersaing, namun tidak ditemukan, padahal menurut Pak Andy saat itu berat rata-rata ikan mereka lumayan. Namun tahun kedua hanya mendapatkan Rp 9.000.000,-, mengingat kerugian tersebut pihak BUMDes menghentikan kegiatan tambak pada tahun 2019.

## 2) Kegiatan Keday Harian

Keday harian yang juga satu bangunan dengan sekretariat BUMDes Elok Basamo telah ada sejak tahun sejak Oktober 2019. Keday tersebut terletak di tepi jalan raya lintas Pekanbaru-Bangkinang dan terletak di dusun tertengah dari Desa Penyasawan. Keday barang harian milik BUMDes Elok Basamo ini menyediakan berbagai barang kebutuhan pokok harian, dan juga terdapat pom mini di depan keday.

*"Keday ini modalnya dari hasil tambak, modal awal sekitar 55 juta untuk bangunan dan isi semua ini, juga pom mini yang di depan itu 12 juta. Setiap keuntungan tambak kita kumpulkan, lalu bangun ini, dan dibagi dua kantor setengah, keday setengah. Sejauh ini keuntungan dari keday harian kita kisaran 200 ribuan sampai 500 ribuan perhari, tergantung hari juga, selayaknya keday harian lah ya."*, ujar Bapak Andy. (Hasil wawancara pada 08 Agustus 2020).

*"Keday kita ini manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Kita juga jual dengan harga yang kita mahal, ambil untung paling sekadarnya, sama dengan keday biasa. Kita juga jual yang dicari masyarakat, sembako, makanan ringan, minuman dan kita juga buka pom mini, karena menurut kita itu dibutuhkan, premium*

*kita jual 8000 perliter, pertalite 8500 perliter, kita sendiri yang cari langsung ke spbu.", terang Bapak Silpa. (Hasil wawancara pada 08 Agustus 2020).*

Berdasarkan penuturan Ibu Marina selaku karyawan keday harian untuk saat ini kegiatan jual beli stabil dan memang tidak bisa dapat untung besar karena kedaynya juga kecil dan barang yang ada juga tidak begitu lengkap. Ibu Marina juga berinisiatif membuat daftar belanja yang diperlukan masyarakat lebih beragam walau jumlahnya sedikit. “*Sehari paling sedikit 200 ribu, paling banyak kisaran 500 ribu. Kalau daftar belanja saya catat yang ditanya warga yang tidak ada, nanti pas belanja barang kita beli 2-5 1 produk, tidak banyak tapi jadilah untuk pelepas tanya pembeli di kita.*” . (Hasil wawancara pada 12 September 2020 pukul 10.00 Wib). Berikut adalah laporan keuangan keday harian:

Tabel 4.4 Laporan Keuangan Keday Barang Harian BUM Desa Elok Basamo  
Oktober 2019- Oktober 2020<sup>43</sup>

No	Periode	Uang Masuk	Belanja Barang	Gaji Karyawan	Biaya Listrik
1	19 OKTOBER-31 OKTOBER 2019	1.285.000	1.700.000	1.400.000	202.000
2	1 NOVEMBER -30 NOVEMBER 2019	4.978.000	2.500.000	1.400.000	202.000
3	1 DESEMBER- 31 DESEMBER 2019	4.064.000	3.100.000	1.400.000	202.000
4	1 JANUARI-30 JANUARI 2020	1.786.000	1.450.500	1.400.000	202.000
5	1 FEBRUARI-28 FEBRUARI 2020	1.516.000	890.000	1.400.000	202.000

<sup>43</sup> Data BumDes Elok Basamo 2020

6	1 MARET-30 MARET 2020	1.357.000	1.020.000	1.400.000	202.000
7	1 APRIL-30 APRIL 2020	2.602.500	3.508.000	800.000	152.000
8	1 MEI-30 MEI 2020	2.087.500	1.929.000	800.000	152.000
9	1 JUNI-30 JUNI 2020	2.069.500	3.272.000	800.000	152.000
10	1 JULI-27 JULI 2020	1.822.500	2.067.500	800.000	152.000
11	1 AGUSTUS -31 AGUSTUS 2020	2.794.000	1.700.000	800.000	152.000
12	1 SEPTEMBER - 30 SEPTEMBER 2020	2.077.000	2.005.000	800.000	152.000
13	1 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020	1.808.000	1.542.000	800.000	152.000

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa beberapa kali terjadi minus, dimana menurut keterangan dari Bapak Silpa selaku bendahara bahwa untuk menutupi ketekoran tersebut diambil dari keuntungan kredit yang sudah berjalan optimal sejak bulan Januari.

Pada bulan April 2020, pengurus mengganti karyawan keday harian yang semula 2 orang, menjadi 1 orang saja, hal tersebut guna mengakali pengeluaran, sehingga gaji karyawan yang semula Rp 1.400.000,- bisa ditekan menjadi Rp 800.000,-.

*“ Kita dulu niatnya mau untung besar, tapi selama berjalan begitulah realitanya, banyak tekor, tapi kita konsul ke Kepala Desa dan untuk sementara keuntungan kredit kita jadikan untuk bayar gaji karyawan keday dan modal belanja. Nanti akhir 2020 kita mau tutup buku dan rapikan lagi, insyaaAllah tahun 2021 lebih baik.”* , ujar Bapak Andy. (Hasil wawancara 02 November 2020).

Berdasarkan data dan wawancara kegiatan keday harian belum memiliki pendapatan bersih atau keuntungan, malah pihak BUMDes selalu menutupi ketekoran dengan memakai keuntungan kredit barang, terlihat bahwa pengelolaan keuangan keday harian masih belum stabil.

### 3) Kredit Barang

Kegiatan kredit barang dimulai Desember 2019, dimana dana yang digunakan adalah dana yang bersumber dari Bantuan Khusus Pemerintah Provinsi Riau. Adapun prosedur dan persyaratan administrasi pengajuan kredit barang di BUMDes Elok Basamo tergolong mudah, yaitu photocopy identitas diri berupa ktp atau kk, materai 6000, DP 20% dari total harga barang dan surat pernyataan bersedia membayar angsuran kredit maksimal 10 bulan harus lunas.

*"Kredit kita baru mulai Desember 2019, kita dapat dana dari Bantuan Khusus Pemprov. Dan itu kita gunakan kredit barang. Kita pikir apa yang baik, kalau misal buat usaha lagi itu seperti tidak membantu masyarakat langsung, jadilah kita buat kredit barang, kita carikan barang yang diinginkan masyarakat, mereka datang ke kita, kita carikan apa yang mereka mau, kita sistem mudah saja, 20% untung kita ambil untung dari dp, dan angsuran kita nggak ambil untung lagi. Sejauh ini yang terserap adalah sekitar.. Alhamdulillah masyarakat senang, karena mereka bisa dapat barang yang diinginkan tapi kredit dan tidak banyak bunganya.", ujar Bapak Andy. (Hasil wawancara 08 Agustus 2020).*

"Ibu terbantu sekali, karena mau hp layar sentuh tuk anak sekolah online bisa, dan mereka juga bunganya dikit, bisa bayar kapan saja, tidak dipaksa, syarat juga mudah, kita bisa milih langsung barang sesuai yang kita inginkan.", ujar Ibu Sumarni salah satu nasabah kredit barang. (Hasil wawancara 06 September 2020).

"Kita sudah minta pengurus BUMDes untuk sosialisasi agar penyerapan dana makin cepat dan keuntungan bisa langsung nyata.", ujar Ketua BPD. (Hasil wawancara 12 September 2020).

"Kredit kita awalnya waswas juga, tapi karena setelah dirembuk dengan pihak Desa dan BPD kita setuju kredit. Di kredit kita, masyarakat juga bisa mengambil barang selain di mitra kita. Mitra kita ada 2, edo ponsel dan sulay eletronik". Ujar Bapak Silpa. (Hasil wawancara 08 Agustus 2020).

Pada pembukuan kredit pihak BUMDes hanya menulis besaran kredit tanpa menulis barang yang dikreditkan nasabah. Berikut adalah tabel daftar kredit nasabah mulai 13 Desember 2019 hingga 30 Januari 2020:

Tabel 4.5 Daftar Nasabah Kredit Barang BUM Desa Elok Basamo  
Desember 2019- Januari 2020<sup>44</sup>

No.	Tanggal	Nama	Besar Kredit
1	13/12/2019	Indra	4.000.000
2	20/12/2019	Indra Akir	2.000.000
3	20/12/2019	Syafriadi Alwi	3.000.000

<sup>44</sup> Data BumDes Elok Basamo 2020

4	20/12/2019	David Mahendra	4.185.000
5	25/12/2019	M.Ridwan (Nova)	4.000.000
6	25/12/2019	Mukti	5.000.000
7	30/12/2019	El Riski	4.500.000
8	05/01/2020	Hen Junaidi	6.000.000
9	10/01/2020	M Anis	6.000.000
10	10/01/2020	Abdul Aziz	2.000 .000
11	10/01/2020	Elsi Prada	3.600.000
12	10/01/2020	Masrizal	1.800.000
13	10/01/2020	Andi Putra Lala	2.300.000
14	10/01/2020	Edi Masri	600.000
15	10/01/2020	Ap Roy	3.000.000
16	10/01/2020	Dedi Alfian	3.280.000
17	10/01/2020	Marzuki	2.400.000
18	13/01/2020	Kabat	1.800.000
19	15/01/2020	Marzuki (Uki Labot)	1.500. 000
20	17/01/2020	Roni Tianak	7.200.000
21	18/01/2020	Malis	2.600.000
22	18/01/2020	Betti	2.150.000
23	23/01/2020	Reza	2.500.000
24	23/01/2020	Indra Akir	22.100.000
25	23/01/2020	Prizal	2.600.000
26	23/01/2020	Yoyon (Anggota Rizal)	2.800.000

27	23/01/2020	Yani Jopun	5.500.000
28	23/01/2020	Jopun	930.000
29	25/01/2020	Budhi Akmal (Unyil)	2.000.000
30	25/01/2020	Sulaiman	11.500.000
31	25/01/2020	Aweldi Putra	3.000.000
32	25/01/2020	Suhadi	2.800.000
33	25/01/2020	Hijar Muhammadiyah	2.000.000
34	25/01/2020	Asmanizar	8.000.000
35	26/01/2020	Almizan	2.400.000
36	26/01/2020	Nurahmi (Kakak Firdhaus)	2.000.000
37	29/01/2020	Edo (Rita)	2.400.000
38	29/01/2020	Idel (Numi)	2.000.000
39	29/01/2020	Herni (Afrizal Kholis)	3.000.000
40	30/01/2020	Andi Tamas	1.500.000
41	30/01/2020	Mardalis	1.800.000
42	30/01/2020	Indah	2.390.000
	<b>Total</b>		<b>136.135.000</b>

Pada 2 bulan pertama dana sebesar Rp 136.135.000,- telah terserap dari Rp 138.000.000,- yang artinya 98% dana telah terserap dengan keuntungan sebesar Rp 50.040.000,-. Kegiatan kredit barang ini langsung menjadi primadona yang membantu masyarakat secara nyata, dan keberhasilan pihak BUMDes untuk

sosialisasi kegiatan kredit patut diacungi jempol. Keuntungan kredit barang diperoleh dari Keuntungan kredit barang pada 2 bulan pertama dijadikan modal terusan untuk kredit berikutnya sebagai berikut:

Tabel 4.6 Daftar Nasabah Kredit Barang BUMDes Elok Basamo  
Maret-September 2020<sup>45</sup>

No.	Tanggal	Nama	Besar Peminjaman
1	01/03/2020	Lismayanti	5.830.000
2	01/03/2020	Ridwan Tianak	4.350.000
3	01/03/2020	Rayyen	2.000.000
4	01/03/2020	Donal Sarli	5.220.00
5	01/03/2020	Viki Rita	4.000.000
6	01/03/2020	Andi Daud	5.000.000
7	01/03/2020	Afrizal	2.640.000
8	01/03/2020	Eris	1.560.000
9	01/03/2020	Yunasri	1.800.000
10	01/03/2020	Al Amin	1.200.000
11	06/03/2020	Sulaiman	5.500.000
12	13/03/2020	Hendri Morin	3.000.000
13	18/03/2020	Ranti Maria	1.900.000
14	18/03/2020	Adi Wijaya (Ombing)	2.400.000
15	18/03/2020	Feri KPU	2.440.000
16	29/03/2020	Indra Akir 3	1.200.000

<sup>45</sup> Data BumDes Elok Basamo 2020



17	13/04/2020	Afriandi	780.000
18	23/05/2020	Hendra Junaidi	4.800.000
19	15/06/2020	Anton Efendi	2.400.000
20	15/06/2020	Abang Geri	1.600.000
21	15/06/2020	Andi	1.370.000
22	15/06/2020	Geri	3.500.000
23	25/06/2020	Ipit Pulau Sarak	4.000.000
24	30/07/2020	Sumarni	2.400.000
25	07/08/2020	Yuli Darni	2.400.000
26	17/08/2020	Indrawati	12.000.000
27	17/08/2020	Indri Abella	500.000
28	27/08/2020	Ahmad Yani	2.800.000
29	24/09/2020	Andi Iran	760.000
Total			89.350.000

Pada bulan April hingga September terlihat minat pengajuan kredit barang berkurang drastis, menurut Bapak Andy hal itu karena pandemi yang membuat hampir seluruh masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini juga membuat angsuran kredit menurun, pihak BUMDes sudah mengajukan peringatan pada nasabah yang tidak ada membayar angsuran, namun belum ada tindaklanjut.

*“ Ada yang sampai sekarang tidak mengansur, kita kasih peringatan, dan jika sudah 3 kali peringatan masih juga belum kita langsung konsul ke Kepala Desa dan Desa bilang kita tunggu dulu sampai akhir 2020. Jadi tindaklanjut untuk yang belum*

*membayar itu sejauh belum ada selain peringatan dan juga tidak bisa mengajukan kredit kembali, mereka juga alasan karena korona, tidak ada kerja, rata-rata di sini warga itu kerjanya buruh kebun karet dan sawit, terus ada yang jualan juga, dan buruh bangunan, itu rata-rata yang kredit di kita. Kreditnya juga macam-macam, ada hp, tv, kulkas, mesin cuci.” , terang Bapak Andy. (Hasil wawancara 08 Agustus 2020).*

Tabel 4.7 daftar nasabah yang tidak ada sama sekali mengangsur kredit<sup>46</sup>

No.	Tanggal	Nama nasabah	Besar Kredit
1	20/12/2019	David Mahendra	4.185.000
2	10/01/2020	Dedi Alfian	3.280.000
3	23/01/2020	Jopun	930.000
4	26/01/2020	Nurahmi (Kakak Firdhaus)	2.000.000
5	01/03/2020	Yunasri	1.800.000
6	01/03/2020	Andi Daud	5.000.000
7	15/05/2020	Geri	3.500.000
8	25/05/2020	Ipit (Pulau Sarak)	4.000.000
Total		24.695.000	

Menurut penuturan Ibu Ranti yang juga salah satu nasabah kredit, kegiatan kredit ini sangat membantu warga, jadi beliau secara khusus tidak perlu repot meminjam uang atau kredit ke tukang kredit yang menurutnya mengambil untung

<sup>46</sup> Data Bum Desa Elok Basamo 2020

besar, “ *Sejak ada kredit saya jadi mudah, kemaren itu kredit mesin jahit, karena saya juga baru selesai kursus jahit, dan proses mudah, angsuran juga berapa kita mau, mereka juga mau jemput ke rumah.*” . (Hasil wawancara 30 Agustus 2020).

Kegiatan kredit barang BUMDes Elok Basamo memiliki 2 mitra yaitu Edo Ponsel dan Sulay Elektronik. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Edo selaku pemilik Edo Ponsel: “ *Dulu Andy kontak saya, bilang dia mau ambil barang untuk kredit di kita dan saya suka dengan kegiatan mereka itu, mereka juga bayar lunas langsung, jadi adalah diskon sedikit biar mereka juga untung kan, mereka sudah bantu ambil di kita dan sama-sama membantulah.*” . (Hasil wawancara pada 12 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dan data, dapat disimpulkan bahwa kegiatan kredit berjalan, walau ada kendala nasabah yang belum ada membayar angsuran. Hasil dari perputaran kredit tahap pertama juga menuai hasil yang besar sehingga kegiatan kredit bisa berjalan hingga Oktober 2020 dan pengurus juga mengharapkan kegiatan tersebut jadi kegiatan unggulan BUMDes Elok Basamo.

#### **4.2.3 Perataan**

Perataan berkenaan dengan keadilan yang didapat oleh masyarakat. Dan berorientasi pada kepuasan sosial. Perataan bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan yang ada. Perataan dirumuskan dengan pertanyaan "Apakah seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan?".

Penulis mencoba menanyakan hal tersebut kepada Direktur BUMDes berikut adalah hasil wawancaranya.

*"Kegiatan kita semua merata dirasakan masyarakat, seperti kredit semua bisa ikut, asal syarat terpenuhi, ada juga aparat Desa, atau pegawai negeri yang ikut. Kalau keday karena letak di pinggir jalan jadi menurut saya manfaatnya pasti dirasakan masyarakat. Karyawan keday juga merasakan, jadi ada kerja. Begitupun tambak dulu ya."*

Penulis juga menanyakan hal serupa pada Kepala Desa, berikut adalah hasil wawancaranya, *"Manfaat ya? Yang pasti karyawan yang kerja, lalu masyarakat yang kredit atau sekitar keday. Kalau manfaat yang lebih luas belum menurut saya, apalagi ke Desa ya, sedikit sekali kontribusi BUMDes."*

Dan berikut adalah hasil wawancara dengan Ketua BPD, *"Masyarakat Penyasawan pasti merasakan ya. Walau tidak terlalu, tapi itu cukup, semoga ke depannya lebih nyata dan memang besar dirasa ya."*

Penulis juga menanyakan kepada nasabah kredit barang Ibu Ranti, berikut hasil wawancaranya, *"Saya sebagai nasabah kredit merasakan manfaat kredit, pasti yang ikut kredit merasakan ya kemudahan dan manfaat ada kegiatan kredit itu."*

Tetapi dalam kegiatan kredit barang ini, besar kredit tidak dibatasi, dan tidak ditentukan, barang apapun yang diinginkan masyarakat akan diproses oleh pihak Bumdes, tentu hal ini menyebabkan masing-masing masyarakat mendapat manfaat barang dan jumlah biaya kredit yang berbeda. Menurut pihak Bumdes, mereka enggan menetapkan besaran maksimal kredit karena masyarakat hanya kredit barang

sesuai kemampuan dan kebutuhan mereka. *"Kita tidak ada batas maksimal biaya kredit, karena kan masyarakat beda-beda kebutuhannya, jadi terserah."*, ujar Bapak Silpa.

Peneliti juga menanyai Saudari Senda yang jarak rumahnya berdekatan dengan lokasi keday harian, berikut hasil wawancaranya: *"Manfaat keday terasa, kita beli di sana, kalau yang lain saya kurang tahu."*

Saudari Indah selaku nasabah kredit mengatakan bahwa, *"Kalau kredit kata orang tu bisa semua ikut, asal syarat terpenuhi, saya ikut kredit, banyak juga tetangga saya yang ikut."*

Ibu Sumarni menuturkan bahwa, *"Kredit Ibu tahu karena dikasih tahu anak, jadi Ibu rasa semua merasakan program kredit itu, apalagi warga Desa sini, penyasawan itu kecil ya, pasti semua tahu dan merasakan."*

Sedang Saudari Hayati mengatakan bahwa, *"Keday mereka yang di pinggir itu laris kok, saya sering ke sana. Kalau kebijakan lain saya tidak tahu. Mungkin karena memang itu yang nampak ya."*

Mitra BUMDes yaitu Bapak Edo dari Edo Ponsel mengatakan bahwa sejak menjadi mitra, usaha beliau juga ikut merasakan keuntungan. Apalagi sejak pandemi, permintaan ponsel meningkat, karena kebutuhan belajar dari rumah dan kerja dari rumah.

Berdasarkan data, besaran biaya kredit barang perorang berbeda-beda. Dan tentu bunga serta cicilan juga berbeda. Sejauh ini ada beberapa orang yang belum

pernah membayar angsuran kredit. Namun pihak Bumdes belum mengambil langkah tegas, hanya memberi keringanan mengingat pandemi dan ekonomi yang sulit. Penulis menilai langkah pihak Bumdes tersebut perlu ditinjau kembali, mengingat bahwa aliran dana kredit barang masih merupakan perputaran kucuran pertama, agar manfaat dirasakan secara merata oleh masyarakat, maka yang belum pernah mengangsur harus ditindak tegas.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan dalam hal perataan BUMDes Elok Basamo telah melakukan kegiatan yang tepat sasaran dan juga kegiatan mereka telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apalagi kegiatan kedai harian dan kredit barang yang memang disambut baik oleh masyarakat. Kredit barang juga membantu mitra dalam bisnis mereka. Ditambah lagi dengan banyaknya masyarakat yang ikut serta, walau ada hambatan, namun kredit barang merupakan kegiatan yang nyata dan dampaknya juga positif jika dikelola dengan maksimal.

#### **4.2.4 Responsivitas**

Dunn pun mengatakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari sasaran atau masyarakat yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003:437).

Responsivitas dirumuskan dengan pertanyaan “ Apakah kegiatan yang dilaksanakan BUMDes disambut baik dan direspon oleh masyarakat?” , yang berfokus pada respon masyarakat terhadap sebuah kebijakan. Responsivitas berarti tanggapan sasaran

kebijakan. Tanggapan masyarakat atas kebijakan menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini penulis mencoba menanyai informan khususnya masyarakat dan nasabah kredit selaku pihak yang mendapatkan layanan atau merasakan dampak dari kegiatan BUMDes Elok Basamo.

Dalam usaha kedai barang harian dan kegiatan kredit barang, masyarakat merasa puas dan terbantu, berikut adalah pernyataan Ibu Hayati: “ *Harga barang di kedai BUMDes itu murah, tidak terlalu ambil untung, dan di situ juga lumayan lengkap. Kalau kredit saya tidak ikut, tapi jelas sekali itu membantu ya.*” . Hasil wawancara 26 Agustus 2020 pukul 17.00 Wib).

Kemudian Ibu Indah selaku nasabah kredit memaparkan bahwa: “ *Dengan adanya kredit barang saya bisa nyicil kulkas, kalau kredit di tempat lain agak berat di bunganya, di BUMDes itu tidak ada besar, mereka ambil untung di DP saja.*” . (Hasil wawancara pada 19 Agustus 2020 pukul 17.00 Wib).

Sedangkan Saudari Senda mengatakan bahwa, “*BUMDes itu membantu menurut saya, tapi yang nyata cuma kredit, karena mereka sistem kreditnya tidak ribet, kalau keday sama kayak keday biasa.*”.

Penulis juga bertanya pada Bapak Andy, berikut adalah jawabannya, “*Respon dari masyarakat, alhamdulillah baik. Yang tidak kami sangka ya kredit, karena banyak yang minat, dan dana bisa terserap cepat, jadi bisa langsung kita putar.*”

*"Respon masyarakat sejauh ini baik, kita sambut baik semua kegiatan yang dilakukan BUMDes. Kredit banyak yang ikut. Keday juga saya lihat laris.", ujar Pak Edy.*

*"Saya masyarakat tidak tahu juga puas atau tidak. Kalau yang ikut kredit pasti puas, karena ada yang bisa beli apa saja tapi mudah.", ujar Ibu Rasuma.*

Ibu Sumarni selaku nasabah kredit mengatakan bahwa, *"Saya puas dengan pelayan kredit, mereka tidak menetapkan harus bayar berapa, boleh sebisa kita angsurannya, dan kadang dijemput kadang diantar."*

Kepuasan masyarakat terhadap kegiatan kredit barang menjadi satu-satunya ukuran bahwa dalam BUMDes Elok Basamo telah memuaskan masyarakat khususnya nasabah kredit. Berdasarkan data ada 71 nasabah kredit barang sejak Desember 2019 hingga 2020. Di lapangan juga terlihat proses jual beli keday harian lancar dan harga yang terjangkau dan sama dengan harga pasaran juga memuaskan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa hanya 1 kegiatan BUMDes yang memuaskan seluruh elemen yaitu kredit barang. Sedang untuk kegiatan keday harian hanya dirasakan segelintir, dan untuk tambak di awal kegiatan.

#### **4.2.5 Ketepatan**



Ketepatan yaitu berkenaan dengan hasil (tujuan) yang diinginkan berguna bagi masyarakat. Penulis mengajukan pertanyaan "Apakah kegiatan yang diadakan BUMDes Elok Basamo telah tepat sasaran?", dan berikut adalah hasil wawancaranya.

*"Menurut kita kegiatan kita sudah tepat, memang tujuannya untuk masyarakat, kredit ini jadi prioritas kita, karena banyak yang ikut, dan disambut baik oleh masyarakat. Sudah tepat sasaranlah kredit barang kita."*, ujar Bapak Andy.

*"Bagi saya yang dibuat BUMDes sudah tepat semua, sasarannya jelas, mungkin pelaksanaannya memang belum maksimal, belum nampak hasil, tapi pelan-pelan saja, sambil belajar, kalau sungguh-sungguh pasti nanti kelihatan hasil yang besar."*, demikian jawaban dari Kepala Desa.

*"Tepat pasti tepat ya, karena memang BUMDes kan untuk masyarakat. Kredit itu sangat tepat tapi pelaksanaannya saya juga tidak tahu, pasti ada kendala ya."*, demikian jawaban Pak Edy.

*"Kegiatan kita semua tepat sasaran. Cuma pelaksanaannya kita ya begini. Semua yang ada ini untuk masyarakat."*, ujar Pak Silpa.

Berdasarkan observasi penulis, dari semua kegiatan Bumdes Elok Basamo yang paling tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat adalah kegiatan kredit barang, sedang keday harian dan tambak ikan tidak terlalu dirasakan dampak langsung pada masyarakat. Kredit barang memberi solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan barang-barang tertentu.

Sejauh ini kegiatan kredit barang memiliki banyak nasabah dengan total 71 nasabah dan pada 2 bulan pertama telah terserap 98% dana peruntukan kredit barang. Namun

dalam pelaksanaannya ada saja kendala, seperti ada yang belum membayar angsuran serupiahpun.

Ke depannya pihak Bumdes berharap kegiatan kredit barang jadi kegiatan utama yang memang menghasilkan kontribusi besar bagi Desa, dan dapat memuaskan serta membantu masyarakat yang membutuhkan barang-barang tertentu.

#### **4.2.6 Kecukupan**

Kecukupan berkenaan dengan biaya tetap, efektivitas tetap dan dirumuskan dengan pertanyaan "Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan?" . Kecukupan merupakan tujuan sementara yang apakah sudah dirasa cukup, mampu memuaskan kebutuhan, nilai dan menumbuhkan kesempatan untuk progres yang lebih besar.

Kecukupan juga berkenaan dengan usaha yang dilakukan terkait dengan kendala-kendala dan strategi dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Direktur BUMDes menyatakan bahwa:

"Kalau ditanya cukup untuk tambak ikan dulu cukup ya, tapi pas harga pelet naik dan harga jual ikan turun ya jadi nggak ketemu. Keday harian modal dulu cukup, tapi ke sininya karena dua karyawan jadi kewalahan nyari gaji, karena pendapatan segitu, belum lagi listrik dan belanja barang bulanan, kita siasati saja, pakai duit yang ada. Kredit itu cukup, kan banyak, masalahnya ya itu tunggakan itu.", ujar Bapak Andy.

"Kita pandai-pandai saja kalau uang. Apalagi kan tinggal 2, keday dan kredit, jadi kurang sana ambil sini dulu, nanti akhir tahun, baru kita buat pembukuan. Belajarlah ya. Kita juga bingung mengatasi yang nunggak itu, tapi dibiarkan dulu, nanti tanya ke Desa.", ujar Bapak Silpa.

Terlihat bahwa belum ada tindakan khusus dan pengawasan terhadap nasabah kredit masih rendah. Keuangan keday harian juga belum baik dan lancar.

Menurut peneliti komitmen dan ketegasan dari BUMDes sangat diperlukan dalam kredit barang karena kredit barang berpotensi menjadi kegiatan yang menjanjikan dan strategis dari BUMDes Elok Basamo yang mampu menambah pendapatan BUMDes dan agar bisa menjadi salah satu peningkatan terhadap pendapatan asli desa.

### **4.3 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEGIATAN BUMDES ELOK BASAMO**

#### **4.3.1 Faktor Pendukung**

*"Faktor pendukung kita dana dari Desa, modal awal 75 juta, itu yang kita manfaatkan dan kelola dengan baik. Lalu masyarakat juga harus mendukung kegiatan kita. Dan tentu dari kita para pengurus yang memang mau bantu Desa agar lebih maju. Faktor penghambat ya dari pengurus juga, yang ya kalau bicara*

*pendapatan di sini kan tidak ada, kita ikhlas nanti didapat segini ya untung. Intensif yang dari keuntungan tahunan juga kami tidak ambil karena memang minim ya, harapannya tahun 2021 bisa usul gaji tetap ke Desa, nanti kita lihat mau diambil dari uang mana.", ujar Pak Andy.*

*"Pendukungnya dana, Desa kasih kita dana awal 75 juta, terus ada dana bantuan dari pemprov 138 juta, itulah yang kita kelola.". Ujar Bapak Silpa.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung kegiatan BUMDes Elok Basamo adalah modal, pengurus, partisipasi masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan baik itu karyawan dan nasabah kredit barang.

#### **4.3.2 Faktor Penghambat**

Suatu kegiatan tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat, begitupun dengan kegiatan-kegiatan BUMDes Elok Basamo. Berikut adalah faktor-faktor penghambat kegiatan BUMDes Elok Basamo menurut hasil analisa penulis:

##### 1) Efektifitas

Faktor yang menghambat tercapainya tujuan (efektifitas) dari seluruh kegiatan Bumdes Elok Basamo adalah manajemen pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan kegiatan, dimana jika Bumdes memiliki strategi pelaksanaan yang tepat pasti tujuan-tujuan yang ada akan tercapai mengingat modal dan sarana prasarana Bumdes Elok Basamo sangat memadai.

##### 2) Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan dana dan keuntungan bersih. Kegiatan tambak ikan yang semula untung harus diberhentikan karena harga jual ikan dipasaran yang jatuh dan modal pelet yang melambung.

Sedang pada kegiatan keday harian, terlihat di awal bahwa gaji 2 karyawan menyebabkan semua keuntungan keday habis, dan belanja barang yang tidak menentu menyebabkan pihak Bumdes harus menutupi kekurangan modal belanja barang dari dana lain.

3) Perataan

Faktor penghambat dalam indikator perataan yang ditemukan penulis terdapat dalam kegiatan kredit barang, dimana pihak Bumdes tidak menetapkan besaran maksimal kredit barang perindividu.

4) Responsifitas

Faktor penghambat dalam indikator responsifitas menurut observasi penulis adalah ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pihak Bumdes terkait kegiatan-kegiatan Bumdes.

5) Kecukupan

Faktor penghambat dalam indikator kecukupan adalah tidak adanya biaya tetap, atau besaran pasti. Kegiatan kredit barang dilakukan dengan sistem perputaran jadi keuntungan hanya diketahui perakhir tahun. Begitupun keday harian, besarnya keuntungan perbulan tidak menutupi biaya belanja barang yang tidak tetap.

6) Ketepatan

Berdasarkan observasi penulis tidak ditemukan faktor penghambat indikator ketepatan, karena kegiatan Bumdes Elok Basamo memang mengutamakan kebutuhan masyarakat.

#### 4.4 Problem Solving

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes Elok Basamo diuraikan sebelumnya, penulis menawarkan beberapa solusi.

- 1) Menurut penulis perlu diadakan penataran terhadap seluruh jajaran pengurus dan pengelola kegiatan BUMDes dengan Pemerintah Desa dan BPD. Dimana nanti dalam penataran dijelaskan dan diuraikan apa itu BUMDes dan mengkaji BUMDes yang sudah berhasil di pelbagai Desa yang harus dijadikan motivasi untuk meningkatkan produktifitas dan pendapatan BUMDes Elok Basamo. Pengurus juga bisa mengunjungi BUMDes lain di Kampar yang sukses, mengingat di Kampar ada beberapa BUMDes yang sukses, berikut adalah BUMDes sukses di Kampar:

Tabel 4.8 BUMDes Unggulan di Kabupaten Kampar<sup>47</sup>

No.	Desa	Nama BUM Desa	Bidang Usaha Unggulan
1.	Pulau Gadang	Koto Panjang Sepakat	Perikanan
2.	Sumber Makmur	Sumber Makmur	Simpan Pinjam
3.	Penghidupan	Hayati	Pertanian

<sup>47</sup> Data Dinas Pmd Kabupaten Kampar 2020

- 2) Pihak BUMDes perlu melakukan sosialisasi dan membuka lowongan kerja baru lagi, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi BUMDes tuk membuka lowongan baru, mengingat kegiatan yang ada hanya membutuhkan tenaga kerja yang minim.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berikut adalah kesimpulan yang dirangkum berdasarkan analisis dan pembahasan tentang evaluasi kegiatan BUMDes Elok Basamo:

1. Kegiatan BUMDes Elok Basamo telah berjalan namun belum maksimal, dimana berdasarkan indikator efektifitas atau pencapaian tujuan dari didirikannya BUMDes Elok Basamo belum tercapai semua, hanya ada 2 poin yang tercapai namun belum maksimal yaitu membuka lapangan kerja untuk masyarakat dan memberi kontribusi kepada APBDes. Untuk indikator efesiensi dana belum maksimal, terlihat dari kegiatan tambak yang dihentikan dan keday harian yang rasio pengeluaran (belanja

barang, gaji karyawan, biaya listrik) dan keuntungannya perbulan cenderung rugi. Sedangkan pada indikator perataan manfaat kegiatan Bumdes telah dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat, terutama dalam kegiatan kredit barang. Dalam indikator responsivitas terlihat bahwa masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Bumdes telah banyak, apalagi dalam kegiatan kredit barang. Dalam indikator ketepatan kegiatan Bumdes telah tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan untuk indikator kecukupan, modal yang ada telah banyak namun belum ada pembiayaan tetap dan pengelolaan keuangan yang maksimal.

2. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes Elok Basami yaitu manajemen kegiatan dan keuangan yang belum maksimal, partisipasi masyarakat kurang, sosialisasi keberadaan dan kegiatan BUMDes terhadap masyarakat juga tidak ada, tidak adanya kerjasama Pemerintah Desa dan BUMDes Elok Basamo untuk meningkatkan tujuan pendirian BUMDes. Sedangkan faktor pendukung kegiatan BUMDes adalah modal, dan sarana prasarana yang memadai.

## 5.2 Saran

Berikut adalah saran yang penulis sampaikan berdasarkan bab hasil dan pembahasan yaitu, untuk meningkatkan efektifitas (tujuan) dan efisien dana dari Bumdes Elok Basamo perlu manajemen dan strategi baru, sementara itu untuk meningkatkan responsivitas masyarakat perlu sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan Bumdes Elok Basamo. Pihak Bumdes bisa mengajak Pemerintah Desa khusus LPM dan BPD bekerjasama untuk meningkatkan indikator perataan, kecukupan dan ketepatan.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Eko, Sutorso dkk. 2014, Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembangunan Desa
- Hadi Triono, Usman dan Tarmizi, 2014. Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa. Pekanbaru: Fitra Riau
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. Sistem Pembangunan Desa. Jakarta
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. Serial Bahan Bacaan Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun. Jakarta
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. Serial Bahan Bacaan Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta
- Kencana Safiie, Inu. 2013. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi. Jakarta: Pt. Bumi Aksara
- Munaf, Yusri. 2015. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing
- Muslimin. 2002. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Malang: Bayu Media & UMM
- Nanang Martono. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wiratna, V. 2018. *Metodologi Peneitian*. Pustaka Baru: Yogyakarta

Sukasmanto. 2014. Seri Buku Pintar Bum Desa Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan Bum Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (Fppd)

### **Peraturan Perundang- Undangan**

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 9 Tahun 2009 Tentang pedoaman pembentukan BUMDes

Peraturan Desa Penyasawan Nomor 003 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

### **Jurnal/ Hasil Penelitian**

Andika, Muhammad dan Usman. 2013. *Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Berdagai*. Jurnal Universitas Medan Area Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 1 (2) (2013): 98-111

F, Sidik. 2015. *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. 19(2), 115-131

Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda, C.F. 2014. *Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes)*. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), 3(2), 21-30

Hayyuna, Rizka, Ratih Nur Pratiwi, Lely Indah Mindarti. 2014. *Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No 1, Hal. 1-5

Junaidi, Mahbub. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Syariah Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Al-Iqtishadi Vol. 2 No. 1 Oktober 2015

Hidayah, Ulul. 2019. Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): Studi Kasus Bumdes Harapan Jaya Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Jshp Vol. 3 No. 2 2019 P-Issn: 2580-5398 E-Issn: 2597-7342 144 . Fakultas Ekonomi Dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia

Nugraha, Adiatma, Kismartini. 2019. Evaluasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Rejo Mulyo, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat

Kabupaten Semarang. *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol 1, Nomor 1, Juni 2019

- Nugroho, Dendhi Agung. 2015. *Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014– April 2015)*. *Jurnal JESP-Vol. 7, No 2* Nopember 2015
- Ramadana, C.B., Ribawanto, H., & Suwondo. 2013. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068-1076.
- Tama, Dantika Ovi Era dan Yanuardi. 2013. *Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 1-28
- Junaidi, Mahbub. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Syariah Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi*. *Jurnal Al-Iqtishadi* Vol. 2 No. 1 Oktober 2015
- Nugroho, Dendhi Agung. 2015. *Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014– April 2015)*. *Jurnal JESP-Vol. 7, No 2* Nopember 2015
- Ramadana, C.B., Ribawanto, H., & Suwondo. 2013. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068-1076.
- Tama, Dantika Ovi Era dan Yanuardi. 2013. *Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 1-28
- Suryati. 2015. *Evaluasi Programnasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Oleh Pemerintah Desa*. *Ejournal Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman*